

**HUBUNGAN BILATERAL ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN
PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL
(*BILATERAL RELATIONSHIP BETWEEN INDONESIAN AND
AUSTRALIAN GOVERNMENT FROM INTERNATIONAL LAW
PERSPECTIVE*)**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

IRMA ZAVITRI

NPM : 45 12 060 009

Fakultas Hukum / Ilmu-Ilmu Hukum

Universitas Bosowa Makassar

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Mahasiswa :

Nama : Irma Zavitri
Nomor Pokok Mahasiswa : 45 12060009
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Internasional
Nomor Pendaftaran Judul : B.08/FH/Unibos/VI/2017
Tanggal Pendaftaran Judul : 12 Juni 2017
Judul Proposal : **HUBUNGAN BILATERAL ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (I).

Makassar,.....April 2019

Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abdul Haris Hamid, SH., MH.


Basri Oner, SH., MH.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
UNIVERSITAS
ROSOWA

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Mahasiswa :

Nama : Irma Zavitri
Nomor Pokok Mahasiswa : 45 12060009
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Internasional
Nomor Pendaftaran Judul : B.08/FH/Unibos/VI/2017
Tanggal Pendaftaran Judul : 12 Juni 2017
Judul Proposal : **HUBUNGAN BILATERAL ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (I).

Makassar,.....April 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Internasional** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 146/FH/UNIBOS/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Rabu, 15 Mei 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Irma Zavitri** Nomor Pokok Mahasiswa **4512060009** yang dibimbing oleh **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.** dan **Basri Oner, SH., M.H.** selaku **Pebimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

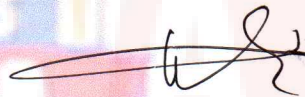
Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

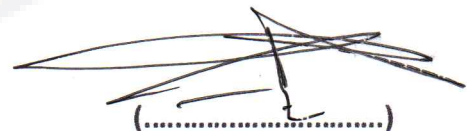
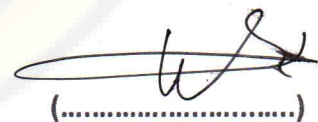
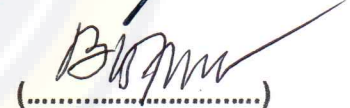
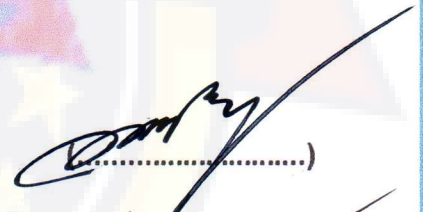
Ketua

: 1. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.

2. Basri Oner, S.H., M.H.

3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

4. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada ALLAH SWT, Tuhan yang maha kuasa yang merupakan sumber segala ilmu dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Bosowa dan juga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Penulis juga ingin menghaturkan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Abdul Haris Hamid, S.H., M.H. dan Basri Oner, S.H., M.H. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas masukan dan dukungannya hingga rampungnya skripsi ini.
2. Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. dan Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. selaku penguji skripsi penulis. Terimakasih atas perbaikan, masukan, dan dorongan untuk penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini.
3. Kepada Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., selaku dekan dan penasehat akademik penulis. Terimakasih atas bimbingan, dorongan, dukungan dan nasehat-nasehatnya untuk selama proses penyelesaian studi penulis.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada kedua orangtuanya, Drs. Andi Balasa dan Siti Asmarani untuk segala cinta, pengorbanan tanpa pamrih, dan doa tulus yang diberikan demi kesuksesan dan kelancaran studi penulis. Juga kepada adik perempuan tercinta untuk dukungan dan doanya selama proses penyelesaian studi penulis.

Dan tentu saja ucapan terimakasih yang mendalam kepada para teman seperjuangan kelas eksekutif Fakultas Hukum angkatan 2012, Universitas Bosowa. Terimakasih atas bantuan, dukungan dan waktu yang dihabiskan bersama selama proses penyelesaian kuliah penulis.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini ada begitu banyak kekurangan yang tentu saja jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kritik dan masukan yang membangun untuk perbaikan sungguh teramat di harapkan dan akan diapresiasi setinggi-tingginya.

Makassar 17 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| 1.4 Metode Penelitian..... | 6 |
| 1.5 Analisis Data | 8 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Hukum Internasional..... | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Hukum Internasional | 9 |
| 2.1.2 Sumber Hukum Internasional | 13 |

| | |
|--|-----------|
| 2.1.3 Subjek Hukum Internasional..... | 14 |
| 2.2 Hubungan Internasional | 18 |
| 2.2.1 Tinjauan Umum Hubungan Internasional | 18 |
| 2.2.2 Hubungan Diplomatik Antarnegara..... | 19 |
| 2.3 Hubungan Bilateral..... | 21 |
| 2.3.1 Pembukaan dan Pemutusan Hubungan diplomatik..... | 27 |
| 2.3.2 Tugas-Tugas Perwakilan Diplomatik | 30 |
| 2.3.2 Hak-Hak Istimewa dan Kekebalan Diplomatik | 31 |
| 2.3.4 Ketentuan Hukum Mengenai Hubungan Diplomatik | 31 |
| BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 3.1 Hubungan Bilateral Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam Perspektif Hukum Internasional | 33 |
| 3.2 Faktor Penghambat Dalam Hubungan Bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam Perspektif Hukum Internasional | 44 |
| BAB 4 PENUTUP | |
| 4.1 Kesimpulan | 52 |
| 4.2 Saran | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 55 |
| APPENDIX | 57 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup tanpa manusia yang lainnya, karena tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya manusia tentunya akan menjalin hubungan dengan sesama manusia dan akan membentuk sebuah kelompok atau komunitas. Dari kelompok atau komunitas tersebut lahirlah pemikiran terbentuknya sebuah negara. Di mana negara merupakan organisasi sosial berdasarkan wilayah tertentu dengan tujuan untuk membangun, memelihara dan mempertahankan nilai-nilai kondisi sosial dasar khususnya keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan.

Negara tidak jauh berbeda dengan manusia sebagai individu. Negara juga tak dapat hidup sendiri dan membutuhkan negara lain untuk mencapai tujuannya. Maka lahirlah keinginan untuk melakukan hubungan antar negara yang lazimnya kita sebut dengan hubungan internasional (*international relations*).

Semenjak lahirnya negara-negara berdaulat di dunia banyak perkembangan yang terjadi pada prinsip-prinsip hubungan internasional (*international relations*), hukum internasional (*internasional law*) dan diplomasi (*diplomacy*). Dalam praktiknya

hubungan antar negara ini diwakili oleh perwakilan-perwakilannya. Hampir semua negara pada saat ini diwakili di wilayah-wilayah asing oleh perutusan-perutusan diplomatik (*diplomatic envoys*) dan stafnya.

Perutusan-perutusan diplomatik (*diplomatic envoys*) dari suatu negara dikirim untuk melakukan perundingan-perundingan dengan membawa suatu misi yang berhubungan erat dengan kepentingan dari negara pengirim tersebut. Metode atau cara yang digunakan para perutusan-perutusan diplomatik (*diplomatic envoys*) dalam berunding dengan negara lain disebut dengan diplomasi (*diplomacy*).

Pengiriman perutusan-perutusan diplomatik (*diplomatic envoys*) tidak langsung terjadi begitu saja. Hal tersebut telah melalui sejarah yang sangat panjang. Pada awalnya perutusan tersebut hanya dikirim untuk tugas tertentu dan langsung kembali ke negaranya sesaat setelah tugasnya selesai. Pada abad ke XV muncul ide tentang menempatkan perwakilan tetap di suatu negara, meskipun sang diplomat masih harus kembali ke negaranya sesaat setelah tugasnya selesai namun kantor perwakilannya tetap berada di negara penerima. Praktik ini mulai diterapkan di city-state, Italia. Namun, sesungguhnya secara umum munculnya misi-misi diplomatik modern baru mulai sejak abad XVII. Hal ini berkembang di negara-negara Eropa pada pertengahan abad ke XVII setelah *Treaty of Westphalia* pada tahun 1648 (Boer Mauna, 2013:51).

Perkembangan hubungan diplomatik sejak konferensi Wina 1815 menjadi titik awal munculnya pemikiran bahwa hubungan ini perlu suatu kodifikasi baru dan yang lebih luas. Akhirnya pada tahun 1961, tepatnya tanggal 18 April 1961 terciptalah sebuah payung hukum dalam menjalankan hubungan diplomatik yakni Konvensi Wina tentang hubungan-hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations*) atau lebih dikenal dengan Konvensi Wina 1961. Meski demikian hukum kebiasaan internasional masih tetap mengatur masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas oleh Konvensi Wina 1961. Konvensi ini baru berlaku secara efektif pada tanggal 24 April 1964.

Sejak Juni 2013 sudah terdaftar 189 negara yang telah menjadi bagian dari konvensi ini dengan meratifikasinya ke dalam hukum nasionalnya masing-masing termasuk Indonesia. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini sejak tahun 1982 saat kepemimpinan Presiden Soeharto saat itu. Ratifikasi konvensi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1982, selain Konvensi Wina 1961, Indonesia juga meratifikasi protokol opsional dari konvensi ini.

Republik Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat juga ikutserta dalam praktik hubungan internasional. Sejak jaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang saat itu sangat berpengaruh di kawasan Asia tenggara sudah mengenal praktik hubungan

internasional yakni perdagangan, namun perkembangan hubungan internasional Indonesia barulah terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Perkembangan tersebut ditandai dengan pengakuan-pengakuan negara lain atas kemerdekaan Indonesia, turut sertanya Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-bangsa, keikutsertaan Indonesia dalam organisasi regional di kawasan Asia tenggara yang dikenal dengan ASEAN (*Association of Shoutheast Asian Nations*), serta partisipasi Indonesia dalam kegiatan-kegiatan internasional lainnya.

Sebagai negara yang berdaulat Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri, termasuk bebas melakukan hubungan diplomatik dengan negara manapun. Salah satu negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia adalah Australia. Australia merupakan negara yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan laut Indonesia di sebelah selatan. Letak geografis inilah yang menjadi salah satu faktor utama mengapa Indonesia dan Australia menjalin hubungan diplomatik, baik itu di bidang politik, ekonomi, keamanan, pendidikan, sosial dan budaya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis ingin melakukan penelitian dan memilih judul: ***“Hubungan Bilateral Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam Perspektif Hukum Internasional”***.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Bagaimanakah hubungan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam Perspektif Hukum Internasional?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam hubungan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam Perspektif Hukum Internasional?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam Perspektif Hukum Internasional.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui faktor penghambat dalam hubungan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam Perspektif Hukum Internasional.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Segi teoritis dimana lebih menekankan pada pengembangan khazanah ilmu hukum internasional pada umumnya dan khususnya hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia.
2. Segi praktis semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat kepada mahasiswa dan masyarakat agar dapat mengetahui tindakan atau langkah-langkah yang diambil terkait hubungan bilateral dari perspektif hukum internasional, serta khususnya diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan bagi para pembacanya dan dapat mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam bidang hukum internasional terutama terkait hubungan bilateral antar negara.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Pendekatan Masalah

Penggunaan metode penelitian dalam karya ilmiah ini adalah dengan metode pendekatan sosio-yuridis, yaitu dari hasil pengumpulan data melalui wawancara dan pengumpulan informasi melalui literatur-literatur. Secara operasional, pendekatan secara normatif dilakukan dengan pengumpulan data-data hukum sebagai penunjang penulisan dalam karya ilmiah ini.

1.4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Konsulat Jenderal Australia di Kota Makassar. Hal yang menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk memilih lokasi penelitian adalah karena Konsulat Jenderal Australia di Kota Makassar adalah perwakilan Australia yang merupakan salah satu hasil dari hubungan bilateral kedua negara dan dalam hal ini merupakan inti penulisan karya ilmiah ini.

1.4.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dari penulisan karya hukum ini diklasifikasikan kedalam 2 (dua) sumber data berdasarkan jenis data tersebut, yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dari Konsulat Jenderal di kota Makassar.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pengkajian pustaka baik dari dari peraturan perundang–undangan ataupun sumber bacaan lain seperti buku, artikel, hasil penelitian ataupun dari media elektronik berupa media internet.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data karya hukum ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, yaitu peneliti

mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan baik berupa peraturan perundang-undangan ataupun dari sumber bacaan lain seperti buku, majalah, surat kabar, artikel, makalah, hasil penelitian, ataupun dari berbagai media elektronik seperti media komputer/internet yang relevan dengan judul karya hukum ini.

1.5 Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penggunaan teknis analisis kualitatif mencakup data penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Internasional

2.1.1 Pengertian Hukum Internasional

Secara umum hukum internasional dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengikat dan mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja (2013:1), hukum internasional (publik) adalah: “keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata”.

Dari pengertian hukum internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja tersebut dapat dikatakan lingkup hukum internasional tidak lagi hanya seputar negara dengan negara, namun terdapat pula unsur non-negara di dalamnya.

Secara terperinci pengertian hukum internasional juga dikemukakan oleh Shearer (Sefriani, 2012:19) yaitu:

“International law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also:

1. *the rules of law relating to the functioning of international institutions or organizations, their relations with each other, and their relations with states and individual, and*
2. *the rules of law relating to individuals and non-states so far as the rights or duties of such individuals and non-states entities are the concern of the international community."*

Definisi Shearer di atas menjelaskan bahwa hukum internasional mencakup aturan hukum yang mengikat antara subjek dari hukum internasional secara luas dalam hal ini termasuk organisasi internasional bahkan seorang individu.

Selain Shearer ada pula definisi yang dikemukakan oleh John O'Brien, Oppenheim dan Briery (Boer Mauna, 2013:11) yakni:

O'Brien mengatakan, Hukum internasional tidak lain merupakan sistem hukum antarnegara. Batasan O'Brien mengenai hukum internasional ini berdasarkan pemikirannya yang menganggap negaralah aktor utama dari praktik hukum internasional. Sedangkan menurut Oppenheim dan Briery terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum internasional dan bahkan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya.

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan praktik-praktik hubungan internasional serta bertambahnya jumlah negara-negara berdaulat pasca kolonisasi negara Eropa memaksa hukum internasional harus memayungi subjek yang lebih luas lagi seperti, organisasi internasional, kelompok-kelompok supranasional, kelompok-kelompok pemberontak, bahkan individu yang memiliki kepentingan lintas negara. Meski demikian lahirnya subjek-subjek baru hukum internasional tidak melunturkan peran utama negara dalam sistem hukum internasional.

Sifat dari hukum internasional berbeda dengan sifat hukum nasional menurut Prof. Charles Rousseau (Boer Mauna, 2013:3-4)

seorang pakar hukum internasional Universite de Paris, mengatakan:

Sorbonne: alors que le droit interne est un droit de subordination, le droit internationale presente comme un droit de coordination. Yang berarti bila hukum nasional merupakan hukum subordinasi, maka hukum internasional adalah hukum koordinasi. Subordinasi maksudnya ada hubungan tinggi-rendah antara yang diperintah (rakyat) dan yang memerintah (pemerintah). Sedangkan koordinasi maksudnya hubungan internasional yang diatur hukum internasional dilandasi oleh kesamaan kedudukan antar subjek yang terlibat.

Hukum Internasional adalah hukum yang sesungguhnya (*really law*) hal tersebut dikemukakan oleh Oppenheim, di mana hal tersebut dikemukakan berdasar kepada tiga syarat (Sefriani, 2012:8) yakni:

Pertama, adanya aturan hukum, adanya masyarakat, serta adanya jaminan pelaksanaan dari luar (*external power*). Syarat pertama dan kedua sudah sangat jelas terlihat dalam pergaulan internasional sehari-hari. Sedangkan syarat ketiga terefleksi dari sanksi-sanksi external dari hukum internasional yakni dapat berwujud sebagai tuntutan permintaan maaf (*satisfaction*), ganti rugi (*compentation/pecuniary*), serta pemulihan keadaan pada kondisi semula (*repartition*). Di samping itu ada sanksi yang wujudnya kekerasan seperti pemutusan hubungan diplomatik, embargo, pembalasan, hingga perang.

Hukum internasional dikatakan sebagai hukum dengan acuan beberapa bukti yang dikemukakan oleh Dixon (Sefriani, 2012:9), sebagai berikut:

1. Hukum internasional banyak dipraktikkan atau diterapkan oleh pejabat-pejabat luar negeri, pegawai asing (*foreign officers*), pengadilan nasional dan organisasi-organisasi internasional.

2. Negara-negara yang melanggar hukum internasional dalam praktik tidak mengatakan bahwa mereka melanggar hukum karena Hukum internasional tidak mengikat mereka. Dalam praktik negara-negara tersebut senantiasa mencari argumen hukum untuk menjustifikasi apa yang mereka lakukan.
3. Mayoritas negara mematuhi hukum internasional.
4. Adanya lembaga-lembaga penyelesaian hukum seperti arbitrase dan berbagai pengadilan internasional yang senantiasa menggunakan argumentasi-argumentasi hukum dalam penyelesaian sengketa yang ditanganinya.
5. Dalam praktik Hukum internasional dapat diterima dan diadaptasi ke dalam hukum nasional negara-negara. Tidak ada satu negara pun dalam membuat hukum nasionalnya tanpa melihat kaidah Hukum internasional yang ada.

Kedua pakar di atas yakni Oppenheim dan Dixon sepakat bahwa hukum internasional itu adalah hukum yang sesungguhnya selain itu mereka juga sependapat bahwa hukum internasional itu adalah hukum yang lemah (*weak law*). Berikut pendapat Dixon (Sefriani, 2012:11) mengenai hal tersebut:

In comparison with national law, international law may be regarded as weak law, not because of its binding quality, but because of its less organised approach to the problem of adjudication and enforcement. Lemahnya hukum internasional bukan karena kekuatan mengikatnya melainkan mengenai kurang terorganisirnya masalah peradilan serta penegakan hukumnya.

Dari semua itu hukum internasional bertujuan tidak lain untuk menjaga agar ketertiban dan perdamaian dunia tetap harmonis.

2.1.2 Sumber Hukum Internasional

Sumber hukum internasional dapat diartikan sederhana sebagai tempat ditemukannya hukum internasional itu sendiri. Tidak seperti hukum nasional, hukum internasional tidak dibentuk oleh sebuah lembaga legislatif seperti DPR di Indonesia. Satu-satunya organisasi internasional yang mempunyai peran seperti lembaga legislatif adalah PBB namun resolusi-resolusi yang dibentuknya tidak mengikat kecuali mengenai organisasi internasional itu sendiri. Meski PBB sering mengadakan konferensi-konferensi mengenai masalah tertentu namun hal tersebut tidak merumuskan law-making treaties.

J.G Starke (Boer Mauna, 2013:8) membagi sumber-sumber hukum internasional sebagai berikut:

1. Kebiasaan
2. Traktat
3. Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase
4. Karya-karya hukum
5. Keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga-lembaga internasional

Lalu pada Article 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional (www.negarahukum.com) menetapkan bahwa sumber hukum internasional yang digunakan mahkamah dalam mengadili sebuah perkara yakni:

1. Perjanjian internasional (*international conventions*), baik yang bersifat umum maupun khusus
2. Kebiasaan internasional (*international custom*)
3. Prinsip-prinsip umum hukum (*general principles of law*) yang dilakukan oleh negara-negara beradab.
4. Keputusan pengadilan (*judicial decision*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*teachings of the most*

qualified publicist) merupakan sumber tambahan hukum internasional.

Ada beberapa perbedaan pada sumber hukum internasional menurut Starke dan Mahkamah Internasional, yaitu sumber hukum internasional menurut Starke memasukkan keputusan badan arbitrase sedangkan Mahkamah Internasional tidak memasukkannya. Hal tersebut karena Mahkamah Internasional menganggap keputusan-keputusan badan arbitrase hanyalah pilihan hukum dan kesepakatan para pihak perjanjian saja. Lalu di sisi lain prinsip hukum umum dimasukkan dalam sumber hukum oleh Mahkamah Internasional karena dalam mengambil keputusan pada kasus yang belum di atur sebelumnya akan lebih mudah untuk melakukan penafsiran-penafsiran hukum.

2.1.3 Subjek Hukum Internasional

Banyak pendapat mengenai subjek dari hukum internasional. Beberapa pakar berpendapat bahwa negara adalah satu-satunya subjek dari hukum internasional. Di sisi lain ada juga pakar yang berpendapat tidak hanya negara yang menjadi subjek hukum internasional. penulis sendiri sependapat dengan pendapat kedua yakni bukan hanya negara satu-satunya subjek dari hukum internasional. Meski dalam praktiknya negara merupakan aktor utama dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum internasional. Namun,

perkembangan pergaulan internasional dan ilmu pengetahuan memunculkan aktor-aktor baru dalam hukum internasional.

Berikut subjek hukum internasional yang lazim di kenal saat ini:

- a. Negara
- b. Negara bagian
- c. Tahta Suci atau Vatikan
- d. Organisasi (Publik) internasional
- e. *International Non Government Organizations (INGO)*
- f. ICRC (*International Commitee on The Red Cross*)
- g. Organisasi pembebasan/ Bangsa yang memperjuangkan haknya (*National Liberation Organization/Representative Organization*)
- h. *Belligerent*
- i. *Transnational Corporation*
- j. Individu (*Natural Person*)

Namun, dalam hal ini penulis hanya menjabarkan beberapa subjek hukum internasional saja yang terkait dengan objek penelitian penulis. Subjek tersebut adalah negara, negara bagian, dan individu.

a. Negara

Negara adalah subjek hukum internasional yang paling utama, serta memiliki kemampuan penuh (*full capacity*) untuk mengadakan atau untuk duduk sebagai pihak dalam suatu perjanjian internasional.

Menurut I Wayan Parthiana (2002:19) tentang negara sebagai subjek hukum internasional adalah:

Negara memiliki semua kecakapan hukum, suatu kesatuan dapat disebut sebagai negara ketika memiliki wilayah, penduduk tetap, pemerintahan dan kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain.

Dalam menjalankan perannya sebagai subjek hukum internasional setiap negara tentunya harus mendapat pengakuan dari negara lain sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kedaulatan negara memiliki hakikat dan fungsi dalam praktik hukum internasional. Kedaulatan merupakan kata yang sulit karena orang memberikan arti yang berlainan padanya. Menurut sejarah terkait kedaulatan (Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2013:19) adalah:

Asal kata kedaulatan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah sovereignty berasal dari kata latin superanus berarti yang teratas. Negara dikatakan berdaulat atau sovereignty karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi.

Meski dikatakan bahwa negara berdaulat memiliki arti negara memiliki kekuasaan tertinggi. Namun sebenarnya kedaulatan atau kekuasaan negara tersebut terbatas. Maksud dari terbatas adalah kekuasaan negara tersebut dibatasi oleh kedaulatan negara lainnya. Jadi, pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya (Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2013:18) yaitu:

- 1) Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu dan,
- 2) Kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan negara lain mulai.

b. Negara Bagian

Negara bagian hanya terdapat dalam suatu negara yang berbentuk federasi atau disebut sebagai negara federasi. Menurut (I Wayan Parthiana 2002:18), dalam melakukan hubungan internasional ada dua model dari negara federal yaitu:

Pertama, adalah negara federal yang hubungan-hubungan internasionalnya dilaksanakan oleh pemerintah negara federal, sedangkan pemerintah negara bagian hanya mengurus dan mengatur masalah-masalah dalam negeri, dan tidak berhak mengurus dan mengatur masalah-masalah internasional. Contoh negara dari model ini adalah Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Canada, Nigeria, dan India.

Model yang kedua, adalah negara federal yang memberikan hak-hak dan kewenangan kepada negara bagiannya, dalam batasan-batas tertentu untuk mengadakan hubungan-hubungan internasional. Contoh dari model ini adalah Swiss, dan Uni Soviet sebelum terpecah menjadi beberapa negara.

c. Individu (*Natural Person*)

Perdebatan antara para pakar mengenai status individu dalam hukum internasional sangatlah panjang. Pada awalnya individu hanya sekedar menjadi objek dalam hukum internasional. Namun pasca perang dunia hal tersebut perlahan-lahan terkikis. Buktinya telah banyak bermunculan konvensi-konvensi menyangkut kepentingan individu dalam dunia internasional. Selain itu pada dasarnya individu merupakan satuan terkecil dalam hubungan internasional di mana

negara menjadi wadah individu-individu tersebut dalam menjalani kehidupan internasional.

2.2 Hubungan Internasional

2.2.1 Tinjauan Umum Hubungan Internasional

Definisi sederhana dari hubungan internasional menurut Jill Steans & Lloyd Pettiford (2009:9) adalah “hubungan lintas negara”. Lebih luasnya hubungan internasional adalah segala bentuk aktifitas masyarakat global atau dunia”.

Pemaparan Robert Jackson & George Sorensen (2009:2) berhubungan dengan kedaulatan bahwa:

Negara-negara merdeka satu sama lain, paling tidak secara hukum memiliki kedaulatan. Tetapi hal tersebut tidak membuat mereka terasing atau terpisah satu sama lain. Bahkan sebaliknya mereka berdekatan dan saling mempengaruhi. Negara-negara tersebut tentunya mencari cara untuk menyelaraskan kedekatan tersebut. Caramereka menjalin kedekatan itulah sehingga istilah hubungan internasional dikenal.

Dalam praktiknya hubungan internasional mencakup politik global, ekonomi, sosial dan budaya. Namun, bagian terbesar dari hubungan internasional adalah mengenai politik global.

Politik global yang dinamis, berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh manusia. Hubungan internasional klasik lebih menitik beratkan pada politik global ini. Di antaranya mengenai kebijakan luar negeri, hubungan diplomatik, serta perang. Meski demikian hubungan

internasional sekali lagi tidak hanya sekedar mengenai politik tapi banyak aspek di dalamnya.

2.2.2 Hubungan Diplomatik Antar negara

Sampai dengan tahun 1815 ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan hubungan diplomatik berasal dari hukum kebiasaan. Pada kongres Wina tahun 1815 raja-raja yang ikut dalam konferensi sepakat untuk mengkodifikasi hukum kebiasaan tersebut menjadi hukum tertulis. Dan dalam konferensi itu (Boer Mauna, 2013:51) melahirkan: “naskah mengenai hirarki diplomat yang dilengkapi dengan protokol Aix-La-Chapelle tanggal 21 November 1818”. Konferensi Wina tersebut pada dasarnya tidak melahirkan apa-apa, melainkan hanya mengkonversikan kebiasaaninternasional mengenai hubungan diplomatik menjadi sebuah hukum tertulis.

Sejarah itu berlanjut, hingga pada akhirnya sebuah kodifikasi mengenai hubungan diplomatik terbentuk. Pada tanggal 18 April 1961 lahirlah sebuah konvensi yang hingga kini dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan diplomatik. Konvensi itu adalah Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 atau lebih familiar dengan sebutan **Konvensi Wina 1961**. Terciptanya konvensi ini diikuti dengan lahirnya konvensi-konvensi lainnya terkait dengan hubungan internasional.

Meski sebuah kodifikasi tentang hubungan diplomatik telah lahir. Hukum kebiasaan dalam praktik diplomatik tidak dapat dikesampingkan.

Dalam praktik hubungan diplomatik setiap negara memiliki perutusan-perutusan diplomatik (*diplomatic envoys*). Seperti di jelaskan di atas pada konferensi Wina 1815 lahir hirarki diplomat. hirarki tersebut kemudian disesuaikan lalu dituangkan dalam Konvensi Wina 1961 pada pasal 14 sampai 18, menurut ketentuan ini, pimpinan perutusan diplomatik terbagi dalam tiga kelompok (J.G Starke 2001:56) yaitu:

- a. Duta Besar (*Ambassador*) atau utusan diplomatik Paus (*nuncios*) yang diakreditasikan kepada kepala negara dan pimpinan perutusan lainnya yang setingkat itu.
- b. Duta, *Minister* dan *internuncios* yang diakreditasikan kepada kepala negara.
- c. Kuasa Usaha (*charges d'affaire*) yang diakreditasikan kepada kepala negara.

Kecuali dalam masalah pengutamaan dan tata cara, tidak ada perbedaan antara pimpinan misi karena alasan penggolongannya.

Adapun urutan utusan diplomatik secara lengkap menurut kebiasaan praktik diplomatik Indonesia sesuai dengan apa yang tertuang dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri adalah:

- Duta Besar
- *Minister*
- *Minister Counsellor*
- *Counsellor*
- Sekretaris pertama
- Sekretaris kedua

- Sekretaris ketiga
- Atase

Urutan di atas juga merujuk pada jenjang kepangkatan dan gelar diplomatik yang diatur dengan keputusan menteri. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Menteri luar Negeri dapat mengangkat pejabat dari departemen dan lembaga lain untuk melaksanakan tugas-tugas seperti atase-atase teknik tersebut di atas.

2.3 Hubungan Bilateral

Dalam Hubungan Internasional dikenal akan hubungan kerjasama antar negara yang merupakan pertemuan beragamnya kepentingan nasional dari beberapa negara yang sifatnya tidak dapat dipenuhi oleh bangsanya sendiri.

Kerjasama yang terbentuk dari berbagai komitmen sebagian individu untuk mencapai kesejahteraan secara kolektif yang merupakan sebagai hasil adanya persamaan kepentingan.

Hakekat dari pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh setiap negara memiliki sifat universal (global) guna membentuk suatu wadah yang dapat dilaksanakan guna menghindari berbagai pembenturan kepentingan dan menghindari konflik yang bersifat internasional.

Bentuk-bentuk interaksi dan kerjasama dapat dibedakan berdasarkan pihak yang melakukan hubungan antar negara yang

menjadi hubungan bilateral, hubungan trilateral, hubungan regional, dan hubungan multilateral/internasional.

Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara dua pihak yang terlibat, juga meliputi adanya aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral ini adalah “negara”.

Manfaat untuk mengadakan hubungan luar negeri dengan negara lain tentu lebih baik ketimbang bersikap konfrontatif dengan negara tersebut. Adanya perbedaan kepentingan dan kebijakan luar negeri suatu negara sering menjadi pemicu ketegangan atau bahkan konflik antar negara. di dalam hubungan internasional hubungan yang melibatkan dua negara disebut hubungan bilateral. Hubungan ini mencakup beberapa bidang termasuk aspek ekonomi, politik, militer, dan pertahanan keamanan. Menurut Kusumohamidjyo (19:2005) hubungan bilateral diartikan sebagai :

Suatu bentuk kerjasama diantara kedua negara baik yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan, dan struktur ekonomi.

Jadi dalam kerjasama bilateral antara dua negara letak geografisnya yang saling berjauhan tidak lagi menjadi hambatan yang cukup berarti. Perkembangan yang menakjubkan telah memungkinkan semua itu. Semakin tingginya saling ketergantungan antara negara satu dengan yang lain telah menjadikan letak geografis

yang berjauhan tidak lagi menjadi penghalang yang berarti. Hubungan antar dua negara bisa dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti; bidang ekonomi, politik, militer dan kebudayaan. Hubungan akan terjalin sesuai dengan tujuan-tujuan spesifik serta bidang-bidang khusus yang dijadikan tolak ukur bagi suatu negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Dalam hubungan tersebut sangat ditentukan oleh hasil interaksi kedua negara dalam berbagai bidang.

Dilaksanakannya kerjasama bilateral antar dua negara dirasakan akan sangat penting artinya, oleh karena suatu negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya tanpa kerjasama dengan negara lain. Pemanfaatan modal dasar berupa SDA (Sumber Daya Alam) dalam pencapaian tujuan dan kepentingan nasional itu mutlak dilakukan, namun keterbatasan akibat perbedaan letak geografis, keadaan iklim dan luas wilayah negara tidak dapat dihindari.

Suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain akan mengacu pada kemampuan dan kekurangan yang dimilikinya. Terdapat negara yang kaya akan sumber daya alam namun tidak memiliki kemampuan untuk mengolahnya, sementara di pihak lain ada negara yang miskin akan sumber daya alam namun memiliki kemampuan teknologi untuk mengolahnya, dengan adanya perbedaan tersebut maka kemungkinan untuk berinteraksi dalam

kerangka kerjasama sangat besar dimana hasil kerjasama tersebut akan membawa dampak yang luas bagi kehidupan bangsa negara itu.

Pola interaksi timbal balik antara dua negara dalam hubungan internasional di definisikan dengan **hubungan bilateral**. Hubungan bilateral sebagai suatu konsep dalam ilmu hubungan internasional, mempunyai makna yang lebih kompleks dan lebih beragam serta mengandung sejumlah pengertian yang berkaitan dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri.

Terdapat beberapa bidang yang meliputi hubungan bilateral ini, dimana yang paling umum adalah bidang perdagangan, pendidikan dan sosial budaya, politik bahkan pertahanan dan keamanan.

Istilah bilateral atau hubungan bilateral adalah untuk mengasumsikan hubungan yang terjadi antara dua negara yang baik berdekatan maupun berjauhan secara geografis seperti yang dikemukakan oleh Kusumohamidjojo (2007:21) tentang hubungan bilateral sebagai berikut:

Hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara, baik yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh di seberang lautan, dengan sasaran untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan dan struktur ekonomi.

Penggambaran tentang hubungan bilateral tersebut tidak lepas dari kepentingan nasional masing-masing negara untuk mengadakan hubungan dan menjalin kerjasama antara kedua negara, dan tidak tergantung hanya pada negara dekat saja melainkan juga negara

yang jauh letaknya secara geografis. Dengan adanya tujuan-tujuan tertentu untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kerjasama politik, kebudayaan dan struktur ekonomi sehingga menghasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis diantara kedua negara. Dapat dikatakan bahwa hubungan tersebut tidak lepas dari adanya hubungan yang saling mempengaruhi yang memuat reciprositas atau adanya hubungan timbal balik antar dua pihak (dua negara).

Dua negara yang menjalin kerjasama bilateral ini tentu mengharapkan keuntungan. Kerjasama akan melahirkan kesepakatan bersama berupa ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi bersama bagi terjadinya harmonisasi hubungan diantara keduanya. Tentunya kesepakatan-kesepakatan yang telah dilahirkan merupakan kebijakan yang akan memberi keuntungan bagi kedua negara yang bekerjasama sesuai dengan tujuan dari masing-masing negara yang hendak dicapainya.

Interaksi antar negara terjadi karena setiap negara di dunia antara negara satu dengan yang lain memiliki saling ketergantungan. Setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, maka kerjasama dengan negara lain menjadi sangat penting artinya. Sebagaimana Teuku May Rudi (2011:97) menjelaskan bahwa :

Saling ketergantungan antara negara satu dengan negara lain di dunia ini merupakan realitas yang harus di hadapi oleh semua negara. untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing,

maka terjalinlah suatu kerjasama diantara negara dalam berbagai bidang kehidupan.

Oleh karena saling ketergantungan antar negara adalah merupakan realitas yang tidak bisa dihindari dalam perkembangan interaksi global, maka kerjasama antar negara akan terus berlangsung dan berkembang. Perkembangan interaksi antar negara akan terjalin sesuai dengan relevansi kebutuhan masing-masing negara yang berinteraksi. Dan interaksi akan terjadi dalam berbagai bidang kehidupan.

Hubungan bilateral dalam hubungan internasional selalu berada dalam dua konteks hubungan internasional berubah dari waktu ke waktu, sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Pola interaksi hubungan bilateral dalam konteks kerjasama diidentifikasi dengan bentuk kerjasama bilateral. Kerjasama dapat pula diartikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang kehidupan tertentu dengan cara-cara dan tujuan-tujuan yang telah disetujui bersama untuk saling memenuhi kebutuhan bersama.

Apabila dalam menghadapi suatu kasus satu (atau lebih) pihak-pihak yang terlibat gagal mencapai kesepakatan, maka interaksi antar aktor tersebut akan berujung pada konflik. Namun apabila pihak-pihak yang terlibat berhasil mencapai suatu kesepakatan bersama, maka interaksi antar aktor tersebut akan menghasilkan suatu bentuk

kerjasama. Dan itu lah *output* yang diinginkan oleh dua negara yang menjalin hubungan bilateral.

2.3.1. Pembukaan dan Pemutusan Hubungan Diplomatik

Secara umum diakui bahwa setiap negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai *right of legation*. Hak legasi ini ada yang aktif yaitu hak suatu negara untuk mengakreditasikan wakilnya ke negara lain dan hak legasi pasif yaitu kewajiban untuk menerima wakil-wakil negara asing. Hak legasi ini diterima oleh Konvensi Havana 1928. Seperti yang tertuang dalam pasal 1-nya. Namun, pada praktiknya kini hak legasi ini sudah tidak relevan lagi karena suatu negara berdaulat bebas menentukan untuk berhubungan dengan negara mana saja. Hal itu adalah persoalan hubungan baik dan bukan masalah hukum.

Jadi, untuk praktik hubungan diplomatik saat ini sudah tidak ada keharusan untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara lain, serta tidak ada keharusan dalam menerima misi diplomatik asing di suatu negara.

Mengenai pembukaan misi diplomatik (Boer Mauna,2013:77) bahwa:

Konvensi Wina 1961 telah menegaskan dengan jelas bahwa pembukaan hubungan diplomatik antara negara-negara dan perwakilan tetap diplomatik dilakukan atas dasar saling kesepakatan. Kesepakatan ini biasanya diumumkan dalam bentuk resmi seperti komunikasi bersama, perjanjian persahabatan, dan lain-lain.

Jika dijabarkan ada beberapa unsur penting dalam rumusan pasal 2 Konvensi Wina 1961 tersebut. Unsur yang dimaksud adalah adanya kesepakatan. Selain itu dalam rumusan tersebut membedakan atas membuka hubungan diplomatik dan membuka perwakilan tetap. Kedua hal tersebut ditulis dalam pemaknaan yang terpisah.

Di Indonesia sendiri pembukaan hubungan diplomatik dan pembukaan kantor perwakilan diplomatik ditetapkan dengan keputusan Presiden pada dasarnya pembukaan hubungan diplomatik secara umum dimulai dari pengakuan lalu diikuti dengan pembukaan hubungan diplomatik.

Sementara itu berakhirnya misi diplomatik seorang staf perwakilan tertuang pada Pasal 43 Konvensi Wina 1961:

The function of a diplomatic agent comes to an end, inter alia:

- a) *on notification by the sending State to the receiving State that the function of the diplomatic agent has come to an end;*
- b) *on notification by the receiving State to the sending State that, in accordance with paragraph 2 of Article 9, it refuses to recognize the diplomatic agent as a member of the mission.*

Yang dapat diartikan sebagai berikut:

Berakhirnya fungsi staff diplomatik, karena:

- a) Adanya pemberitahuan dari negara pengirim kepada negara penerima bahwa tugas dari pejabat diplomatik itu telah berakhir.
- b) Adanya pemberitahuan dari negara penerima kepada negara pengirim bahwa, sesuai dengan ayat 2 dari pasal 9 Konvensi, negara tersebut menolak untuk mengakui seorang pejabat diplomatik sebagai perwakilan.

Di sisi lain J.G Starke (2001:79) juga mengemukakan poin-poin tentang berakhirnya misi diplomatik dapat berakhir dengan berbagai cara. Beberapa poin yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Penarikan kembali (*recall*) keputusan itu oleh negara yang mengirimnya.
- 2) Pemberitahuan oleh negara pengirim kepada negara penerima bahwa tugas keputusan itu telah berakhir.
- 3) Permintaan oleh negara penerima agar keputusan ditarik kembali (*recalled*).
- 4) Penyerahan paspor-paspor kepada keputusan dan stafnya serta keluarganya oleh negara yang menerima, seperti pada waktu pecah perang antara negara pengirim dan penerima.
- 5) Pemberitahuan oleh negara penerima kepada negara pengirim, jika keputusan itu dinyatakan *persona non grata* dan apabila ia tidak ditarik kembali atau tugasnya belum berakhir, bahwa negara penerima itu menolak mengakuinya lagi sebagai anggota misi.
- 6) Tujuan misi tersebut telah terpenuhi.
- 7) Berakhirnya masa berlaku surat-surat kepercayaan yang diberikan hanya untuk waktu yang terbatas.

Poin-poin Starke di atas berdasar pada ketentuan Konvensi Wina 1961. Di atas juga sempat disinggung mengenai *persona non grata*. *Persona non grata* adalah sebuah istilah yang digunakan sebagai ekspresi ketidakpercayaan suatu negara pada perwakilan diplomatik. Alasannya beragam yakni spionase, konspirasi, ancaman keamanan, penyalahgunaan hak-hak istimewa dan lain-lain.

Pemutusan hubungan diplomatik merupakan suatu langkah terakhir yang dilakukan oleh negara setelah menemukan jalan buntu dalam penyelesaian masalah.

2.3.2. Tugas-tugas Perwakilan Diplomatik

Tugas pokok seorang diplomat tidak lain adalah mewakili negaranya di negara akreditasi dan sebagai penghubung antara pemerintah kedua negara. Secara detail hal mengenai tugas-tugas seorang diplomat dituangkan dalam Pasal 3 ayat 1 Konvensi Wina 1961 seperti berikut:

The functions of a diplomatic mission consist inter alia in :

- a) representing the sending State in the receiving State;*
- b) protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;*
- c) negotiating with the Government of the receiving State;*
- d) ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State;*
- e) promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.*

Yang dapat diartikan sebagai berikut:

Tugas dari perwakilan diplomatik diantaranya:

- a) Mewakili negara pengirim di negara penerima
- b) Melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum internasional
- c) Melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima
- d) Memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim.
- e) Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

2.3.3 Hak-hak Istimewa dan Kekebalan

Hak-hak istimewa, *privileges*, dan kekebalan atau imunitas-imunitas dari perutusan diplomatik dan perwakilan tetap atau kedutaan juga disebutkan dalam Konvensi Wina 1961. Hak, *privilege* dan imunitas tersebut diberikan guna melancarkan fungsi misi diplomatik yang dijalankan perutusan diplomatik di negara penerima.

Beberapa hak, *privilege* dan imunitas perutusan diplomatik dan perwakilan diplomatik adalah perutusan diplomatik menikmati pengecualian dari yurisdiksi perdata dan pidana setempat, perutusan diplomatik tidak dapat diganggu-gugat, kekebalan pada gedung kedutaan dan arsip-arsip serta dokumen-dokumen kedutaan, pemberian fasilitas penuh dari negara penerima kepada perutusan diplomatik dalam menjalankan tugasnya, kebebasan bergerak dan melakukan perjalanan, kebebasan berkomunikasi untuk segala tujuan dinas, pembebasan dari segala bentuk bea dan pajak, pembebasan dari ketentuan-ketentuan keamanan masyarakat, serta kebebasan dari kewajiban dinas dan kemiliteran.

Hak-hak dan kekebalan ini juga berlaku untuk keluarga dan pembantu rumah tangga dalam lingkup kedutaan dan kediaman perutusan diplomatik.

2.3.4 Ketentuan Hukum Mengenai Hubungan Diplomatik

Dari awal pembahasan mengenai hubungan diplomatik telah disebutkan beberapa aturan yang terkait mengenai hubungan

diplomasi. Beberapa diantaranya adalah Konvensi Wina 1961 dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Dua aturan tersebut merupakan dasar yang digunakan oleh negara Indonesia dalam menjalankan praktik hubungan internasional khususnya mengenai pedoman dalam menjalankan misi-misi diplomatik di suatu negara. Meski kemudian muncul aturan-aturan lainnya. Namun, dalam praktiknya kedua aturan ini menjadi pedoman utama dalam melakukan hubungan diplomatik.

Konvensi Wina 1961 menjadi asal mula lahirnya hukum-hukum tertulis lain menyangkut hubungan diplomatik. Indonesia meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1982. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1982 ini menjadi titik awal perumusan sejumlah regulasi-regulasi mengenai hubungan internasional secara nasional yang dimiliki Indonesia.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Hubungan Bilateral Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia Dalam Perspektif Hukum Internasional

3.1.1 Hubungan Bilateral dalam Bidang Politik dan Hukum

Negara Indonesia merupakan tetangga terdekat bagi negara Australia. Kedua negara memiliki sejarah yang sangat panjang yang dimulai dari perjalanan para saudagar-saudagar asal Makassar yang berjelajah hingga ke benua Australia dan bertemu langsung dengan suku asli yaitu suku Aborigin.

Kedekatan geografis ini membuat kehidupan “rumah tangga” diantara keduanya menjadi harmonis dan terkadang berkonflik. Terlepas dari itu, saling mendukung antar kedua negara patut diapresiasi.

Hubungan yang terjalin semakin erat ketika Indonesia yang masih dalam jajahan Belanda ingin memproklamkan kemerdekaannya. Ikatan ini dapat dilihat dari upaya dan tindakan konkret Australia dalam mendukung terlahirnya negara Indonesia. Dukungan ini tidak lepas dari sejarah kedua negara yang telah lama dibangun dan letak geografis kedua negara yang bertetangga.

Bentuk-bentuk dukungan dari Australia adalah mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa agar segera mengakui kemerdekaan Indonesia, menjadi wakil Indonesia dalam komisi Tiga Negara sebagai mediator terlaksananya perjanjian Renville, dukungan Partai Buruh Australia dalam berbagai cara untuk kemerdekaan Indonesia.

Untuk memperkuat kesepemahaman dan hubungan dalam masyarakat, Pemerintahan Buruh Australia mendukung penyusunan "*National Asian Language and Studies in Australian Schools Strategy*". Pemerintahan Buruh akan memberikan prioritas pada Indonesia, seperti peningkatan pertukaran antar warga dan institusi, khususnya di bidang media, pendidikan, kesenian, kesehatan dan pelatihan bahasa.

Terhusus di Kota Makassar, dengan hadirnya Konsulat Jenderal memberikan peluang kerjasama lebih terbuka lebar, terlebih lagi dengan adanya kunjungan dari Walikota *Gold Coast* ke Kota Makassar. Apa yang disampaikan Aaron (Wawancara, 12 Maret 2019), Diplomat pada Konsulat Jenderal Australia di Kota Makassar bahwa:

Dengan adanya hubungan *kota saudara* ini merupakan sebuah hubungan yang sehat bagi kedua negara. Oleh karena itu, *kota saudara* bukan hanya dijadikan julukan, tetapi merupakan sebuah hubungan bilateral yang intim dan mampu memberikan keuntungan

kepada kedua kota yang terlibat melalui realisasi dari hasil kerjasama ini.

Hubungan bilateral yang dibangun dalam bidang hukum sendiri adalah dengan adanya agenda yang rutin dilakukan dalam kerjasama di bidang hukum dan menjadi konsentrasi khusus kedua negara adalah berkaitan dengan isu-isu pemberantasan terorisme. Melihat tantangan keamanan yang berkembang yang ditimbulkan oleh aksi terorisme, kedua negara mengutamakan penguatan kerjasama ini dengan berbagi informasi intelijen, kerjasama penegakam hukum dan keamanan siber. Seperti yang disampaikan Aaron (Wawancara, 12 Maret 2019), Diplomat pada Konsulat Jenderal Australia di Kota Makassar bahwa:

Jadi ada banyak aspek dalam hubungan itu misalnya dapat dilihat dalam hubungan Australia dengan China, hubungan mereka ini lebih banyak berfokus pada sektor Ekonomi, jadi hubungan Ekonomi saja tapi dalam kasus dengan Indonesia, hubungan Australia dan Indonesia lebih luas lagi dengan berfokus pada kerjasama militer, kerjasama di bidang pertahanan, pengembangan system kelautan yang tentu saja ini masih berkaitan dengan bisnis dan komponen kerjasama Ekonomi tapi ada dukungan politik satu sama lain dan juga saya rasa Australia dan Indonesia pemimpinnya dalam wilayah local mendukung adanya perdamaian dan keteraturan di Wilayah Asia misalnya dengan adanya suatu wadah seperti pertemuan Negara-negara Asia Timur.

Kemudian dalam kemitraan kedua negara dalam hal keadilan dan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu atau terpinggirkan. Program kemitraan ini bernama *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ).

Kerjasama ini diprioritaskan dalam hal peningkatan sistem penyelesaian sengketa, meningkatkan publikasi atas putusan-putusan pengadilan, memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum, serta mendukung komisi-komisi hak asasi manusia untuk mendukung reformasi dalam bidang hukum.

3.1.2 Hubungan Bilateral dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan pilar penting dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Dengan adanya hubungan bilateral antar kedua negara ini menunjukkan pilar yang dibangun merupakan penjemputan para generasi yang akan datang agar selalu membangun dan menjaga hubungan yang telah bertahan bertahun-tahun lamanya.

Indikasi dari hubungan bilateral antar kedua negara dalam bidang pendidikan adalah dengan meningkatnya jumlah pelajar dan mahasiswa, baik di Indonesia mau pun di Australia. Kolaborasi yang terbangun antara pemerintah Indonesia dan Australia juga melalui Konsulat Jenderal Australia di Makassar adalah kesuksesan dan pentingnya beasiswa New Colombo Plan dari Pemerintah Australia bagi hubungan antar mahasiswa antara Australia Indonesia, khususnya di kota Makassar.

Hubungan bilateral Indonesia-Australia sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, hal ini menegaskan pentingnya pendidikan. Nota kesepahaman pun telah ditandatangani untuk peningkatan

kerjasama dalam bidang pendidikan. Nota tersebut menjadi dasar kerjasama pendidikan yang lebih erat antara kedua negara, termasuk kunjungan staf dan peserta kursus serta pertukaran informasi tentang metode pendidikan. Pemerintah Australia telah mengirim sejumlah dosen tamu untuk memberikan presentasi tentang sejumlah topik menarik keberbagai Universitas-Universitas di Indonesia.

Kajian Indonesia dan Bahasa Indonesia menjadi prioritas dari adanya program tersebut. Memperkuat pemahaman warga Australia tentang Indonesia merupakan kunci dari terciptanya hubungan harmonis antar warga, terutama dengan negara-negara terdekatnya, terutama dengan Indonesia.

Sebagai penunjang terciptanya kemitraan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia dalam bidang pendidikan, pemerintah mempunyai andil dalam mempererat hubungan bilateral di antara kedua negara tersebut. Kunjungan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison pada tahun 2018 lalu, diharapkan dapat menjadi perantara bagi terjalinnya hubungan bilateral antara pelajar baik yang ada di Indonesia maupun Australia. Indikasi ini dapat dilihat dari kunjungan yang dilakukan seminggu setelah Perdana Menteri yang baru telah dilantik.

Minat pelajar Indonesia yang ingin belajar ke Australia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berbagai program beasiswa yang ditawarkan oleh Australia lewat Kedutaan Besar

Australia di Indonesia memberikan kesempatan bagi setiap siswa yang berprestasi untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan sekolah di Australia, misalnya beasiswa AAS yang merupakan beasiswa bergengsi yang diperuntukkan untuk putra putri terbaik Indonesia untuk melanjutkan sekolah ke Australia.

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam pilar bilateral antara Indonesia dan Australia, ini juga langsung diamini oleh Aaron (Wawancara, 12 Maret 2019), Diplomat pada Konsulat Jenderal Australia di Makassar, bahwa:

Pendidikan adalah sektor yang sangat berperan, kita hampir saja melupakannya. Jadi Australia adalah negara nomor satu yang menjadi tujuan para pelajar Indonesia untuk belajar/bersekolah di luar negeri dan ya ini tentu saja menjadi focus besar bagi pemerintah Australia mengenai kerjasama yang berasal dari sector pendidikan. Jadi ada keuntungan ekonomi bagi Australia melalui hubungan ini. Saya pikir pendidikan adalah sector ketiga terbesar bagi Australia dan dalam waktu bersamaan dan dari sektor ini juga dapat memberikan keuntungan dalam pertukaran budaya antar kedua negara, hmmm ini mendorong adanya interaksi antara Australia dan Indonesia dan saya pikir sebagai timbale baliknya contohnya dapat disaksikan dalam pariwisata di Indonesia, jutaan orang Australia berkunjung ke Bali setiap tahunnya.

Kerjasama yang ditawarkan pemerintahan Australia memberikan dampak yang positif terhadap dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Hubungan kerjasama di bidang pendidikan juga akan membantu mitra hubungan bilateral diantara kedua negara tersebut di masa yang akan datang. Dibentuknya AEI (Australia Education International) adalah prakarsa Pemerintah Australia di bawah

Departemen Inovasi, Industri, Sains, Riset, dan Pendidikan Tinggi (DIISRTE), AEI berupaya meningkatkan kerjasama di bidang kebijakan-kebijakan strategis, peraturan dan undang-undang serta hubungan antar pemerintahan di sektor pendidikan internasional.

AEI memfasilitasi kerjasama penelitian antar lembaga dengan mendukung hubungan tingkat tinggi antara akademisi dan institusi. AEI diwakili oleh seorang Kanselor yang berkedudukan di Kedutaan Besar Australia Jakarta. Harapan terciptanya hubungan Indonesia dan Australia yang harmonis di berbagai bidang, terutama pendidikan adalah kunci keterbukaan pemerintah Australia dalam menjalin kerjasama dengan Pemerintah Indonesia.

Kemudian, program bernama BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) yang berinisiasi mengumpulkan dan mendistribusikan informasi tentang program pembangunan dan bantuan yang tersedia untuk pembangunan kawasan timur Indonesia. Mereka juga mendukung para pelaku pembangunan daerah untuk bekerjasama dan menyelaraskan berbagai inisiatif/prakarsa yang berbeda. Organisasi ini juga menyediakan sarana dan menyusun cara untuk memungkinkan para pelaku pembangunan dalam memberikan sumbangan dalam bentuk tindakan dan pemikiran untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam agenda pembangunan.

Saat ini program inti BaKTI mendapatkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD).

Seperti yang dijelaskan Aaron (Wawancara, 12 Maret 2019) salah satu dari empat diplomat yang bertugas di Konsulat Jenderal Australia di Makassar, bahwa:

Program bantuan atau program pengembangan untuk Indonesia, program bilateral ini dikembangkan dan diurus oleh kedutaan kami di Jakarta jadi kami bekerjasama dengan BAKTI yang membantu kami mengurus program di Indonesia bagian Timur seperti MAMPU yaitu program dari pemerintah Australia untuk perempuan dan atau KOMPAK, adalah program lain yang hadir di bagian Timur Indonesia. Jadi kami bekerjasama baik dengan BAKTI maupun dengan program bantuannya tapi saya rasa keterlibatan kami lebih kepada aspek pengembangan diplomasi publik daripada urusan-urusan teknis jadi secara personal, diplomasi publik adalah kegiatan lain yang kami rasa meningkatkan hubungan Australia dan Indonesia. Seperti program pertukaran seni dan budaya dan juga mempromosikan pemahaman tentang Australia secara umum.

Bahwa kerjasama bilateral dalam bidang pendidikan merupakan hal yang bersifat fundamental karena telah dijalani selama bertahun-tahun dan menjadi simpul hubungan kedua negara walaupun dalam perjalanannya mengalami pasang surut, hal ini menjadi indikasi bahwa kedua negara bahu membahu membangun negara masing-masing.

3.1.3 Hubungan Bilateral dalam Bidang Sosial dan Budaya

Melihat kembali hubungan kedua negara sejak orang-orang terdahulu dari Makassar yang berdagang hingga ke Australia menunjukkan hubungan sosial dan budaya kedua negara telah terbangun sangat lama, bahkan sebelum Inggris menduduki benua Australia.

Di bidang sosial budaya, kegiatan hubungan antar masyarakat di antara kedua bangsa semakin meningkat, tidak saja melalui pendidikan tetapi juga kunjungan wisatawan.

Data yang didapatkan dari www.balipost.com, bahwa kunjungan wisatawan asal Australia pada awal tahun 2019 berjumlah 87.344 orang. Jumlah ini merupakan yang tertinggi dibanding negara-negara lain yang menjadi langganan untuk berkunjung ke Bali.

Menurut Aaron, Diplomat pada Konsulat Jenderal di Makassar (Wawancara, 12 Maret 2019) para wisatawan tidak hanya berhenti di Bali, namun melanjutkan perjalanan ke daerah-daerah lain di Indonesia, seperti yang dijelaskan bahwa:

Terdapat peningkatan dalam jumlah kunjungan wisatawan asal Australia, mereka juga mengunjungi bagian-bagian lain di Indonesia di statistiknya dan ini juga sulit ditemukan karena Bandar udara utama dari Australia ke Indonesia adalah Bandar Udara di Bali jadi mereka mengunjungi tempat-tempat lain setelah mereka dari Bali. Lombok, Labuan bajo menjadi populer sekarang. Juga banyak yang pergi belajar ke Jawa. Jadi mengalami perluasan.

Hubungan antara Indonesia dan Australia dimulai dari para pedagang asal Makassar yang mencapai Australia, ini menunjukkan hubungan kedua negara berumula dari orang-orang Makassar atau dari sebagian besar wilayah di Sulawesi Selatan.

Dalam peningkatan hubungan bilateral dalam bidang sosial dan budaya kedua negara, khususnya di Kota Makassar, Konsulat Jenderal Australia memiliki agenda rutin pada tiap tahunnya dan juga merupakan perayaan antara orang-orang Makassar terdahulu yang bertemu secara langsung dengan suku asli Australia.

Agenda-agenda tersebut adalah NAIDOC (Australian Aboriginal to celebrate Indigenous Australia culture) yang merupakan perayaan hubungan antara penduduk asli atau Aborigin dengan orang-orang Makassar yang telah terbangun bertahun-tahun lamanya, kemudian perkumpulan Alumni yang diketuai oleh komite berpengaruh alumni Australia yang berbasis di Makassar, mendukung pelaksanaan *Makassar International Writers Festival*, serta mengadakan festival film tiap tahunnya.

Guna penguatan dan peningkatan pengajaran Bahasa Indonesia di Western Australia, Balai Bahasa Indonesia telah didirikan di Perth pada April 2008 untuk memberi pelayanan: kursus bahasa Indonesia untuk umum; kelas-kelas bahasa dan budaya Indonesia; penyediaan tenaga pengajar bahasa Indonesia; dan terjemahan dokumen dan tenaga interpreter.

3.1.4 Hubungan Bilateral dalam Bidang Ekonomi

Perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang Makassar dahulu hingga mencapai benua Australia, merupakan perwujudan misi perdagangan dimana perdagangan merupakan salah satu sumber penghasilan untuk menopang kehidupan orang-orang dari Makassar.

Dewasa ini, hubungan perdagangan yang ditandai sejak dahulu berevolusi menjadi kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Khusus di kota Makassar, ditandai dengan dibukanya pabrik terigu asal Australia.

Dari pernyataan Aaron, Diplomat pada Konsulat Jenderal Australia di Kota Makassar terkait hubungan perdagangan (Wawancara, 12 Maret 2019) bahwa:

Hubungan perdagangan antara Australia dan kawasan Indonesia timur adalah untuk pengembangan, jadi salah satu alasan Australia membukan kantor di Makassar adalah untuk meningkatkan hubungan dagang antara kawasan Indonesia Timur dan Australia tapi untuk saat ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya di sini ada pabrik terigu.50 % pabrik terigu kawasan timur dimiliki oleh CPH (yang ini merupakan contoh investasi orang Australia di Makassar. Dan sekarang ini ada banyak bisnis orang Australia yang berfokus pada tambang dan industri mineral.

Jadi dapat dilihat bahwa, keseriusan dalam menjalin kersama dalam bidang ekonomi mulai merambah ke sektor perdagangan dengan dibukanya pabrik terigu serta pertambangan.

Untuk mempererat kerjasama antara kedua negara dalam bidang ekonomi, pemerintah masing-masing telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas, seperti yang dikemukakan Aaron,

Diplomat pada Konsulat Jenderal Australia di Kota Makassar (Wawancara, 12 Maret 2019) yakni:

Daya tarik Makassar sebagai kota penghubung, sebagai pusat interaksi misalnya di sektor wisata sebenarnya Makassar tidak begitu penting sebagai pusat wisata jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang masih berkembang seperti Labuan Bajo atau Tana Toraja tapi sebagai kota yang menjadi pusat pelayanan bagi kawasan Indonesia timur jadi saya rasa masuk akal jika Australia menempatkan dirinya di Makassar karena bagi mereka yang bepergian ke Kawasan timur Indonesia biasanya akan transfer di Makassar, dan dalam hubungan perdagangan juga pekan lalu menteri perdagangan Australia dan Indonesia menandatangani perjanjian perdagangan bebas yang baru, dan ini merupakan suatu kejadian yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah hubungan kedua negara, jadi saya ini akan bagus untuk hubungan ekonomi keduanya.

Langkah yang diambil kedua negara diharapkan dapat saling membantu perekonomian di Indonesia bagian Timur, karena realita selama ini bagian Indonesia paling timur membutuhkan pengembangan yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian.

3.2 Faktor Penghambat dalam Hubungan Bilateral Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam Perspektif Hukum Internasional

Indonesia dan Australia sebagai dua negara yang secara geografis bertetangga, tidak akan mungkin bisa mengelak untuk saling berhubungan. Hubungan bilateral Indonesia dan Australia tergolong hubungan yang sangat unik, di satu sisi menjanjikan berbagai peluang kerjasama namun di sisi lain juga penuh dengan berbagai tantangan.

Berbagai perbedaan menyolok di antara kedua negara dan bangsa bertetangga yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, orientasi politik yang mengakibatkan perbedaan prioritas kepentingan menjadi penyebab utama hal ini terjadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan-perbedaan tersebut akan menciptakan berbagai masalah yang akan selalu mewarnai hubungan kedua negara di masa-masa mendatang.

Selama ini, hubungan Australia-Indonesia mengalami pasang surut. Selain kerja sama di berbagai bidang antara lain ekonomi, politik, keamanan, sosial, dan budaya yang mempererat hubungan dan kebersamaan, terdapat sejumlah masalah yang muncul dan mengganggu. Masalah-masalah yang kerap terjadi antara kedua negara ini telah membuahkan pandangan negatif orang banyak terhadap hubungan kedua negara ini. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa banyak sekali peristiwa yang terjadi pada masa yang lalu yang berpotensi menyebabkan konflik antara kedua negara ini.

Menurut Aaron, seorang Diplomat pada Konsulat Jenderal Australia di Makassar (Wawancara, 12 Maret 2019) bahwa:

“Semua negara bertetangga mengalami pasang dan surut juga. Misalnya kita lihat pada Negara seperti India dan Pakistan dan pada negara Mexico dan Amerika yang terjadi sekarang. Jadi saya rasa kejadian pasang dan surut adalah sesuatu yang biasa saja tapi tentu saja adanya masalah-masalah dalam hubungan itu memberikan dampak pada hubungan personal pada sekelompok orang jadi saya rasa adanya pasang surut ini akan terus berlanjut diantara kedua negara dalam hubungan politiknya tapi saya berharap hal tersebut tidak akan

mengganggu aspek-aspek lain dalam hubungan kedua negara.”

“Kedua negara adalah negara demokrasi jadi kita menganut sistem politik itu dan terkadang keputusan dari salah satu negara demokrasi menjadi masalah bagi negara yang lain dan itu merupakan dimana kedua negara perlu membuat keseimbangan dan sejauh ini saya pikir kedua negara melakukan tugasnya dengan baik dalam hal memisahkan politik domestic dari poliitk luar negeri namun terkadang politik domestik ini dapat mempengaruhi pihak-pihak luar negeri juga.”

Melihat kembali sejenak ke masa-masa yang silam, ditahun 2005, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra mendapatkan terror kiriman paket berisi senyawa biologi. Paket ini dikirim melalui surat untuk Dubes Republik Indonesia di Australia dan diduga berisi bakteri berbahaya sejenis *anthrax*. Kemudian pada tahun 2006 yang lalu, pemerintah Australia memberikan visa sementara kepada 42 pencari suaka asal Papua. Sebanyak 42 warga Papua meminta suaka pemerintah Australia karena merasa tidak aman tinggal di Indonesia. Padahal sebelumnya pemerintah Indonesia sudah menegaskan bahwa warga Papua tersebut tidak dalam keadaan terancam. Keputusan pemerintah Australia ini tidak menyenangkan bagi pemerintah Indonesia.

Bagi pemerintah Indonesia, hal ini merupakan reaksi ketidakpercayaan pemerintah Australia yang buntutnya merugikan pemerintah Indonesia dan juga memperburuk kondisi hubungan antar kedua negara, sehingga pada saat itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Hamzah Thayeb sempat diperintah untuk kembali ke

Indonesia. Selain itu pada tahun 2006 pula, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilecehkan harian koran *The Australian* yang memuat kartun Presiden SBY sedang bersetubuh dengan warga Papua.

Australia dan Indonesia mempunyai perbatasan maritim. Disamping itu, dua negeri tetangga khusus yang lain yaitu Papua New Guinea dan Timor-Timur mempunyai perbatasan langsung dengan Indonesia. Australia mengemban tanggung jawab atas keamanan Papua New Guinea dan Timor-Timur. Semua fakta ini mempunyai potensi timbulnya konflik antara Australia dan Indonesia, baik secara langsung maupun melalui salah satu dari negeri ketiga tersebut.

Pada tahun 2008, banyak nelayan Indonesia asal Kupang yang berunjuk rasa didepan kantor DPRD mengancam sering terjadinya penangkapan terhadap nelayan Indonesia yang sedang menangkap ikan oleh pemerintah Australia, saling tuding terjadi antara kedua belah pihak semakin memperburuk keadaan hubungan bilateral kedua negara ini.

Puncak ketegangan antara kedua negara adalah ketika Pemerintah Australia melakukan penyadapan dalam kurun waktu 2007-2009 terhadap pejabat-pejabat tinggi termasuk Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Tindakan ini direspon dengan menarik Duta Besar Indonesia yang berada di Australia.

Kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia ini, jelas merupakan sebuah pelanggaran hukum internasional karena Australia sudah menciderai kedaulatan bangsa Indonesia. Dalam kasus penyadapan oleh Australia ini bila mengacu pada aspek hukum jelas Australia melanggar peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu UUD No. 36 tahun tentang Telekomunikasi dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun yang ada selama ini Australia selalu dalam kasus penyadapannya berlindung dengan alasan misi diplomatik asing memungkinkannya untuk memperoleh kekebalan diplomatik sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Akan tetapi pemberian imunitas tersebut tidak boleh bertentangan dengan UU yang ada. Sehingga dalam hal ini, jika dugaan pelanggaran penyadapan oleh Australia melalui misi diplomatiknya telah dibuktikan, maka imunitas tersebut dapat dianggap bertentangan dengan UU yang berlaku, dalam hal ini UU Telekomunikasi dan UU ITE. Terlebih jika Australia secara sengaja bekerja samadengan operator jaringan telekomunikasi, maka hal ini tersebut bisa ditindak secara pidana sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Penyadapan yang dilakukan oleh Australia memberikan kerugian terhadap negara Indonesia. Terkait kasus penyadapan yang

dilakukan Australia, negara tersebut dianggap telah melecehkan bangsa Indonesia dan dalam kasus nasionalisme, Australia melanggar kedaulatan NKRI yang menyangkut kerahasiaan negara dan informasi negara.

Belum lagi penyelundupan narkoba yang beberapa kali dilakukan oleh warga negara Australia yang sudah pasti membawa pengaruh dan menciptakan citra buruk dunia Internasional dan khususnya mengganggu stabilitas negara Indonesia sendiri.

Peristiwa-peristiwa ini tentunya akan semakin memperdalam jurang pemisah antara hubungan kedua negara ini untuk bisa saling bekerjasama dengan harmonis atas sesama negara tetangga.

Namun, bagaimanapun juga hal ini merupakan hal yang biasa terjadi antara hubungan bertetangga dan persahabatan. Hampir sama jika kita analogikan dengan orang yang saling bertetangga satu dengan yang lain, terkadang terjadi kesalahpahaman antara keduanya karena sesuatu hal. Adalah naif, jika ada yang berpendapat bahwa pada suatu titik hubungan kedua negara ini akan tercipta sedemikian rupa baiknya, sehingga terbebas dari masalah.

Peristiwa-peristiwa di atas adalah data empiris yang menunjukkan bahwa hubungan kedua negara memiliki kecenderungan yang sangat fluktuatif, sehingga para pemimpin serta masyarakat kedua negara dituntut untuk selalu siap dengan berbagai solusi menghadapi setiap masalah yang muncul.

Menurut Aaron, seorang Diplomat pada Konsulat Jenderal Australia di Makassar (Wawancara, 12 Maret 2019) bahwa:

Jadi ya saya pikir adanya pasang dan surut dalam hubungan kedua negara ini, komunitas diplomatis memiliki peran utama dalam hal ini dimana kedutaan Australia di Jakarta sebagai kedutaan yang terbesar dari segi ukuran dan juga menempatkan misi pemerintahan Australia dalam jumlah terbesar yang ditugaskan di luar negeri juga ada banyak sumber-sumber diplomasi yang di tempatkan di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain maka ini menjadi penanda bahwa pentingnya menjaga hubungan baik dengan pemerintah Indonesia bagi Australia dan juga semoga sumber-sumber diplomasi itu dapat memberikan masukan pada pemerintah Australia dalam membuat keputusan yang menempatkan hubungan kedua negara dalam posisi yang sehat.

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri John Howard, hubungan antara Indonesia dan Australia memang banyak menuai peristiwa yang tidak mengengakkandan dapat merugikan kedua belah pihak, tetapi di lain sisi banyak juga hal positif yang dapat dilihat atas hasil kerjasama yang telah dilakukan oleh kedua negara ini.

Terlepas dari masalah-masalah yang mengandung potensi konflik di atas, Hubungan antara Australia-Indonesia dalam berbagai bidang tergolong tinggi, seperti dalam bidang pendidikan, budaya, dan perdagangan. Hal tersebut merupakan aset penting dalam hubungan kedua negara yang perlu terus dipupuk dan dikembangkan, sehingga diharapkan akan memainkan peran penting dalam peningkatan hubungan kedua negara. Upaya bersama Indonesia dan Australia untuk saling tukar para pemimpin akar rumput, termasuk para pemimpin agama, telah dirintis beberapa tahun terakhir ini.

Semakin kuat dan baiknya hubungan kedua negara, tidak hanya disebabkan oleh sejarah dan letak geografis kedua negara, tetapi juga karena kedua negara telah memiliki berbagai ragam bidang kerja sama bilateral, khususnya adanya kesepakatan *Comprehensive Partnership* dari kedua pemimpin negara. Penyelesaian Ratifikasi *Perjanjian Lombok* perlu dilakukan secepatnya dimana hal ini akan membuat hubungan kedua negara semakin kokoh.

Hubungan bilateral kedua negara perlu memiliki fondasi yang lebih stabil sehingga pergantian pimpinan di masing-masing negara tidak mempengaruhi hubungan kedua negara yang telah terjalin. Namun, faktor terbesar dalam hubungan kedua negara ini adalah adanya saling pemahaman antar bangsa, semakin baik tingkat pemahaman antar kedua negara akan meningkatkan kerjasama menuju hubungan yang semakin baik dan kokoh, begitu pula sebaliknya. Hal itu dapat dicapai dengan meningkatkan pendidikan dalam kebudayaan, bahasa dan tata krama masing-masing negara.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Ada pun yang menjadi kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam perspektif Hukum Internasional adalah dengan menjalin kerjasama dengan tetap mengikuti dan mentaati aturan dan hukum masing-masing negara. Peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya merupakan pengejawantahan dua hubungan hukum yang saling berkaitan dalam menjalani aktivitas kenegaraan. Dengan latar belakang antara orang-orang terdahulu dari Makassar dan suku asli Australia atau Aborigin menjadikan hubungan kedua negara mempunyai pondasi yang sangat kokoh.
2. Faktor penghambat dalam hubungan bilateral kedua negara adalah dengan banyaknya konflik-konflik yang tidak bisa dihindari. Mulai dari konflik Timor-Timur, *illegal fishing*, penyadapan yang dilakukan terhadap pejabat-pejabat tinggi hingga Presiden Republik Indonesia, banyaknya penyelundupan narkoba. Mengingat hubungan kedua negara seperti kehidupan bertetangga yang dalam dinamikanya ada selalu terdapat gesekan maka konflik-konflik tersebut tidak bisa dihindari namun bisa diproteksi dengan

menjaga hubungan kedua negara dengan mengetahui batas-batas dalam bernegara.

4.2 Saran

Dari penjabaran di atas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia dalam perspektif Hukum Internasional, maka penulis memberikan saran, yaitu:

1. Kerjasama antara kedua negara menjadi pilar penting dalam menjaga dan merawat hubungan bilateral. Dengan membangun kerjasama dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya diharapkan meningkatkan pilar-pilar tersebut. Untuk itu, pemerintah Indonesia sebagai pemegang kekuasaan dan pembuat kebijakan diharapkan dapat membuat kebijakan strategis dan kebijakan operasional yang dijadikan sebagai landasan penyusunan program dan sasaran pembangunan, sehingga implementasi dari hubungan bilateral dimaksud dalam masyarakat bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
2. Konflik-konflik yang timbul antara kedua negara merupakan sesuatu yang dapat dimaklumi mengingat letak geografis kedua negara yang saling berdekatan dan sama-sama mempunyai histori panjang dalam berinteraksi satu sama lain. Namun, konflik yang sering terjadi dapat diminimalisir apabila negara Indonesia tidak

hanya menarik Duta Besar serta gertakan semata namun harus mengambil langkah yang lebih tegas. Hal ini penting untuk menegaskan konflik diplomatik ini adalah wilayah antar pemerintah, agar tak menjalar menjadi sengketa warga antar negara. Dengan melakukan tindakan yang tegas, hubungan bilateral bisa dibangun kembali dengan dasar yang lebih setara.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Boer Mauna. 2013. ***Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global***. PT. Alumni. Bandung.
- Budiono Kusumohamidjoyo. 2007. ***Hubungan Internasional : Kerangka Studi Analisis***. Bina Cipta. Jakarta.
- I Wayan Parthiana. 2002. ***Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1***. Mandar Maju. Bandung
- Jemadu Aleksius. 2008. ***Politik Global dalam Teori dan Praktik***. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Jill Steans & Lloyd Pettiford. 2009. ***International Relations: Perspectives and Themes***. Terj. Deasy Silvia Sari. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- J.G Starke. 2001. ***Introduction to International Law***. Terj. Bambang Iriana Djajaatmadja. Sinar Grafika. Jakarta.
- Teuku May Rudi. 2011. ***Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional***. PT Angkasa. Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes. 2013. ***Pengantar Hukum Internasional***. PT. Alumni. Bandung.
- Robert Jackson & Georg Sorensen. 2009. ***Introduction to International Relations***. Terj. Dadan Suryadipura. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sefriani. 2016. ***Hukum Internasional: Suatu Pengantar***. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sefriani. 2016. ***Peran Hukum Internasional: Dalam Hubungan Internasional Kontemporer***. Rajawali Pers. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

C. Sumber Lainnya

<http://www.balipost.com>

<http://www.bbc.com>

<http://www.negarahukum.com>

<https://tirto.id/cfkq>



**Transkripsi hasil wawancara dengan Diplomat di Konsulat Jenderal Australia di
Makassar, tanggal 12 Maret 2019**

Information:

Interviewer: Irma : I

Interviewee : Aron: A

I: so let me introduce myself. My name is Irma Zavitri. You may call me Irma. that is I-R-M-A.

Terjemahan: Perkenalkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Irma Zavitri, anda bisa memanggil saya Irma. Itu I-R-M-A.

A : Irma

Terjemahan: Irma

A: yes

Terjemahan: Ya

I: have you heard hmmm hurricane called Irma in the US?

Terjemahan: Pernahkah kamu mendengar hmmm angin rebut bernama Irma di Amerika?

A: uh I have yeah yeah.

Terjemahan: Uh, ya pernah.

I: yes you know I can destroy things.

Terjemahan: Ya, anda tahu saya mampu menghancurkan sesuatu

A and I are laughing together.

Terjemahan: Pak Aron dan pewawancara tertawa bersama.

I: hmmm ya as I told you before I took my master degree in English and I met you hmmm when the students from Australia came here. From hmmm Colombo , Colombo scholarship.

Terjemahan: Hmmmm ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa saya mengambil S2 saya pada jurusan Bahasa Inggris dan kita bertemu ketika mahasiswa dari Australia. Dari Colombo, beasiswa Colombo.

A: New Colombo plan, yes yeah from Flinders University

Terjemahan: New Colombo Plan, ya dari Universitas Flinders.

I: yes yes I brought them with Fadhillah from Hasanuddin University

Terjemahan: Ya ya saya membawanya kemari bersama Fadhillah dari Universitas Hasanuddin

A: ah yes yeah

Terjemahan: Ah ya

I: so I do voluntary works at international office in Hasanuddin University, so you know

Terjemahan: So saya mengerjakan kegiatan-kegiatan sukarelawan di kantor Urusan Internasional Universitas Hasanuddin, jadi ya kamu tahu.

A : ya ya

Terjemahan: Ya ya

I : then I continue my law studies in the private university

Terjemahan: Lalu saya melanjutkan kuliah jurusan hukum di kampus swasta

A: Bosowa University?

Terjemahan: Universitas Bosowa?

I: yes, Bosowa University

Terjemahan: Ya, Universitas Bosowa

A: and you are writing a master thesis or?

Terjemahan: Dan kamu menulis tesis master atau?

I: undergraduate

Terjemahan: Skripsi S1

A: hmm undergraduate thesis

Terjemahan: Hmmm Skripsi tesis

I: so it is basically about the bilateral relationship between Australia and Indonesia so I would like to go further about this kind of relationship.

Terjemahan: Jadi pada dasarnya tulisan ini tentang hubungan bilateral antara kedua negara Australia dan Indonesia dan saya ingin melihat lebih jauh tentang hubungan kedua negara ini.

A : yeah

Terjemahan: Ya.

I: so basically it is all about like what you, what the Consulate general do in terms of to strengthen this kind of relationship and

Terjemahan: Jadi dasarnya ini tentang adalah tentang apa yang anda, Konsulat jendral yang kerjakan untuk memperkuat hubungan kedua negara.

A: yeah

Terjemahan: ya

I : I sent the list of the questions

Terjemahan: Saya mengirimkan daftar pertanyaannya kepada anda

A: yes, I had the brief, look at the questions earlier hmm but for myself so I work with the Australian consulate in Makassar hmmm so the Australian Government has four offices in Indonesia. We have embassy in Jakarta, hmm as well as a consulate in Bali, a consulate in Makassar and just last year we opened the fourth office in Surabaya, Consulate in Surabaya as well.

Terjemahan: Ya, saya punya ringkasannya sesaat yag lalu, saya lihat daftar pertanyaannya hmm saya bekerja di kantor Konsulat Jendral di Makassar hmmm jadi

Pemerintah Australia memiliki empat kantor di Indonesia. Kami memiliki kedutaan di Jakarta, dan juga konsulat di Bali dan Makassar dan baru saja tahun lalu kami membuka kantor keempat di Surabaya, juga Konsulat Jendral.

A: Hmm so our office can has three Australian posted diplomats, myself and consulate general Richard Matthew and our Consul Sean as well as six local staff, local staff members . So our work here hmm given that way such a small office is very diverse so it may include work like promoting Australia's education system and supporting commercial, Australian commercial activities in Indonesia and hmm through an investment and trade hmm supporting Australian education activity so after New Colombo plan that you are involved with hmm we also have a community of, a large community of Australian Alumnae here in Makassar. That we try to make with and hmm maintain contact with

Terjemahan : Jadi kantor kami memiliki tiga orang diplomat yang ditugaskan di sini, saya sendiri, konsul Richard Matthew dan Konsul Sean juga bersama kami ada enam orang staff local, anggota staff local. Jadi pekerjaan kami di sini diwadahi dengan kehadiran sebuah kantor kecil dengan beraneka ragam pekerjaan yang mencakup yaitu mendukung kegiatan pendidikan Australia, jadi setelah kegiatan New Colombo plan yang mana anda terlibat di dalamnya kami juga memiliki komunitas, komunitas besar bagi para alumni Australia di sini di Makassar. Yang mana kami selalu berupaya bekerjasama dan menjaga kontak dengan mereka.

I: do you work with BAKTI?

Terjemahan : Apakah anda bekerja dengan BAKTI?

A: ah we do work with BAKTI although hmmm the aid program is developed the Australian government aid program to

Terjemahan: Ah kami bekerja dengan BAKTI meskipun program bantuannya di bangun oleh program bantuan pemerintah Australia.

I : what's? what's that?

Terjemahan: Apa? Apa itu?

A : *bantuan*

I: oh aid program

Terjemahan: Oh program bantuan

A: yah aid program, or development program to Indonesia the bilateral program is developed and administered by our embassy in Jakarta so hmm we engage both with BAKTI and who helps the program in eastern Indonesia example is MAMPU the Australian government woman program and or KOMPAK, is another program which is presence in Eastern Indonesia.

Terjemahan : Ya program bantuan, atau program pengembangan untuk Indonesia program Bilateral ini dikembangkan dan di urus oleh kedutaan kami di Jakarta jadi kami bekerjasama dengan BAKTI yang membantu kami mengurus program di Indonesia bagian Timur seperti MAMPU yaitu program dari pemerintah Australia untuk perempuan dan atau KOMPAK, adalah program lain yang hadir di bagian Timur Indonesia.

A: so we engage with both BAKTI and the aid program but it is typically more I suppose our involvement is more on the public diplomacy aspect of development rather than the technical administration so hmm I personally don't have a detail understanding of the aid program and how they work although I have hmmm maintain the quality and improving the aid program yeah and what else do we do? we also do yeah public diplomacy is another activity which is I suppose encouraging linkages between Australian and Indonesia. Hmm Yeah so that cultural exchange and arts program and just generally promoting local understanding about Australia.

Terjemahan : Jadi kami bekerjasama baik dengan BAKTI maupun dengan program bantuannya tapi saya rasa keterlibatan kami lebih kepada aspek pengembangan diplomasi public daripada urusan-urusan teknis jadi secara personal saya tidak memiliki pemahaman yang lengkap persoalan program bantuan dan apa lagi ya yang kami lakukan disini? Oh yah diplomasi public adalah kegiatan lain yang kami rasa meningkatkan hubungan Australia dan Indonesia. Yeah seperti program pertukaran seni dan budaya dan juga mempromosikan pemahaman tentang Australia secara umum.

I: yeah yeah that's really important in diplomacy

Terjemahan: Ya, itu sangatlah penting dalam diplomasi

A : yeah

Terjemahan: ya

I: Sometime it works better than you know. Political diplomacy, I guess. Btw so maybe we are going to have like an hour around an hour. Do you have time?

Terjemahan: Terkadang saya rasa itu malah berfungsi lebih baik dibandingkan dengan diplomasi politik. Jadi kita akan memiliki sekitar satu jam untuk sesi ini. Apakah anda memiliki waktu?

A : yeah, that is okay

Terjemahan: Ya, tentu saja bisa.

I: so which one do you prefer? We talk in English or in Bahasa?

Terjemahan: Jadi anda lebih memeliki sesi ini dalam bahasa Inggris atau Indonesia?

A: bisa mungkin dua-duanya yah? Kalo may perhaps I speak in English but if you don't understand saya bisa menjelaskan coba menjelaskan dalam bahasa Indonesia

Terjemahan: Saya bisa berbicara dalam bahasa Inggris tapi jika anda tidak paham maka saya bisa menjelaskan dalam bahasa Indonesia.

I: Do you study bahasa Indonesia?

Terjemahan: Apakah kamu belajar Bahasa Indonesia?

A : saya belajar bahasa Indonesia di Jogja tapi hanya untuk tiga bulan di sana dan beberapa bulan di Australia

I: and how does it feel?

Terjemahan: Jadi bagaimana menurut anda?

A : dan saya belum lancar

I: okay, I mean should I deliver the question in Bahasa or in English?

Terjemahan: Jadi maksud saya apakah saya harus menjelaskan pertanyaannya dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris?

A: yeah saya bisa mengerti dalam Bahasa or but you can also explain in English if you will prefer

Terjemahan: Atau anda bisa menjelaskannya dalam Bahasa Inggris jika anda lebih nyaman

I: yeah right, right. I hope the recording is quite clear.

Terjemahan: Yeah, baiklah. Semoga alat rekamnya berfungsi dengan baik

I : So okay, can we start?

Terjemahan: Baik. Bisa kita mulai sekarang?

A: yes

Terjemahan: Ya.

I: so maybe first of all it is more about the historical background about the relationship. How it is started between Indonesia and Australia and what is the background behind this bilateral relationship.

Terjemahan: Jadi untuk yang pertama anda bisa lebih menjelaskan soal latar belakang sejarah hubungan kedua negara tentang bagaimana mereka memulai hubungannya dan apa latar belakang terciptanya hubungan bilateral ini?

A: so I can see here the questions was since when the bilateral relationship being established

Terjemahan: Jadi dari pertanyaan yang saya lihat di kertas ini ditanyakan tentang kapan hubungan bilateral kedua negara dibangun

I: yeah yeah

Terjemahan: Ya betul.

A: hmm well it depends on how one defines the bilateral relationship. So hundreds of years ago before European settlement of Australia, Makassar fisherman or traders used to trade and seek for cucumbers with Indigenous Australia in Northern Australia. So I suppose that would describe this, it is the first contact obviously at that time was an Indonesia and was known as an Australia. So the Australian I suppose support of the concept of Indonesia got back to the 1940s, pre Indonesian independence. so as I understand there was an Australian and sea workers union of workers, hmm *apa namanya, serikat pekerja* that supporting Indonesian independence by blockading Sidney harbor from by blockading, preventing Dutch military vessels from disembarking in Sydney hmmm and then so after Indonesian Independence, so official recognition of Indonesian independence was 1940.

Terjemahan: Baik. Jadi saya rasa permulaan hubungan kedua negara ini tergantung pada bagaimana seseorang mendefinisikan awal hubungan kedua negara. Jadi ratusan tahun yang lalu sebelum pendudukan Eropa di Australia, nelayan Makassae atau pedagang Makassar terbiasa berdagang dan mencari teripang bersama dengan penduduk Asli Australia yang berada di Australi bagian Utara. Jadi saya kira ini dapat menggambarkan bagaimana kontak pertama yang nampak jelas diketahui sebagai orang Indonesia dan Australia. Jadi saya rasa juga Australia adalah pendukung konsep soal terbentuknya Negara Indonesia di tahun 1940an, masa sebelum kemerdekaan negara Indonesia. Jadi sejauh yang saya pahami ada beberapa orang Australia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Australia yang mendukung kemerdekaan negara Indonesia dengan cara menahan kapal Pasukan Militer Belanda untuk berlabuh di Pelabuhan Sydney. Jadi setelah kemerdekaan Indonesia, pengakuan kemerdekaan resmi di tahun 1940an

I: 1945?

Terjemahan: 1945 bukan?

A: I think it was 1947. I will just check that with Google, but Australia was one of the first country to recognize Indonesian independence. So I will just quickly Google it.

Terjemahan: saya rasa itu terjadi di tahun 1947. Tunggu lebih baik saya mencarinya di Google, dalam hal ini Australia adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Negara Indonesia secara resmi. Jadi tunggu saya pastikan dulu di Google informasinya.

-----A and I are laughing-----

Terjemahan: A dan I tertawa bersama

A: so yeah Australia has maintained a close relationship with Indonesia ever since that point.

Terjemahan: ya jadi sejak saat itu Australia dan Indonesia memiliki hubungan yang akrab.

I: so basically it is started by trade, commercial and going to political, preparation for Independence, helping Indonesia to you know tackle the Dutch

Terjemahan: jadi pada dasarnya hubungan ini diawali melalui perdagangan dan politik, dimana Australia membantu Indonesia untuk menahan gempuran Belanda.

A: so yeah, do you have any more questions on?

Terjemahan: ya, apakah anda memiliki pertanyaan lagi soal hal ini?

I: Why did these two countries establish this relationship? Why Australia established this bilateral relationship? What's the purpose? What's the future impact for Australia? What will you get?

Terjemahan: mengapa Australia membangun kerjasama dengan Australia? Apa tujuan di balik hubungan bilateral kedua negara ini? Dan apa dampaknya bagi Australia? Apa yang Australia akan dapatkan dari hubungan kedua negara?

A : I presume hmm I suppose the early leaders of Australian recognize the importance of Indonesia as a country for Australia, given a large population and closed proximity to

Australia, so local relationship with neighbors. It is better to have good relationship with your neighbor than the bad one.

Terjemahan: Saya menganggap bahwa pemimpin-pemimpin pada zaman dahulu kala sudah mengetahui pentingnya kehadiran Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar dan adanya kedekatan jarak dengan Australia, hubungan local, jadi ini adalah hubungan dekat antar tetangga. Lebih baik memiliki hubungan baik daripada yang buruk dengan tetangga.

I: yeah that's true and of course our neighbors will help us first, right?

Terjemahan: ya saya rasa anda benar. Tetanggalah yang akan membantu kita duluan, bukan?

A: that's correct. Yeah a lot of examples of us helping one another

Terjemahan: itu benar adanya. Ada banyak contoh dimana kita saling membantu sama lain.

I: so it is a geographical reason like because we are neighbors so we will have better mutual understanding, maybe because we share culture.

Terjemahan: jadi hubungan ini dikarenakan alasan geografis juga, karena kita tetangga dimana kita akan lebih bisa saling memahami dan karena kita memiliki kaitan kebudayaan.

A: exactly. Yeah true. Looks like Australia.....

Terjemahan: ya benar. Sepertinya Australia....

_____pause_____ Mr. Aaron is checking his phone

Terjemahan: terputus karena Pak Aaron mengecek Hp nya.

A: jadi secara resmi itu terjadi di tahun 1994

**(informasi setelah dia mengecek Google di HPnya).*

I : eh 1949?

Terjemahan: eh 1949?

A: yeah 1949

*Terjemahan: ya tahun 1949. *smiling*

I: Numbers is difficult right? *smiling

Terjemahan: Mengingat nomor itu sulit bukan?

A: Yeah true. Pretty much. 1949

Terjemahan: Yeah benar. sulit sekali. Tahun 1949.

I: 1949, yeah. So you know in the relationship there is a dynamic. Sometimes it is up and sometimes it downs

Terjemahan: baik, tahun 1949. Jadi sebagaimana yang anda ketahui bahwa hubungan diantara kedua negara mengalami dinamika dalam perjalanannya. Kadang pasang sering pula surut.

A: Pasang dan surut

I : *yes, pasang dan surut.* How do you see this situation? and how does it affect to both countries?

Terjemahan: Ya, pasang dan surut. Lalu bagaimana anda melihat situasi ini? Dan bagaimana hal ini berdampak pada kedua negara?

A: hmm yeah I think all neighbors have ups and downs in a relationship. So we see that hmm with India and Pakistan and with Mexico and the US at the moment. So I think it is natural to have ups and down but really those relationship issues have significantly have personal relationship between people so I think they will continue to be ups and downs in political relationship abut hopefully that does not continue to disturb other aspects of the relationship.

Terjemahan: Yah saya semua negara bertetangga mengalami pasang dan surut juga. Misalnya kita lihat pada Negara seperti India dan Pakistan dan pada negara Mexico dan Amerika yang terjadi sekarang. Jadi saya rasa kejadian pasang dan surut adalah sesuatu yang biasa saja tapi tentu saja adanya masalah-masalah dalam hubungan itu memberikan dampak pada hubungan personal pada sekelompok orang jadi saya rasa adanya pasang surut ini akan terus berlanjut diantara kedua negara dalam hubungan politiknya tapi saya berharap hal tersebut tidak akan mengganggu aspek-aspek lain dalam hubungan kedua negara.

I: For you it is natural, normal. So it is okay

Terjemahan: Jadi bagi anda ini adalah sesuatu yang alamiah, normal saja. Jadi bukanlah menjadi suatu masalah, bukan?

A: Hmm yeah I would say it is natural

Terjemahan: Yah saya akan menyebutnya sesuatu yang alamiah saja.

A: Both countries are democracy so we behold on to a political system and sometimes the decision of democratic, democracy mind often dose of another and that something that both country need to balance and I think both of the two countries are doing good job in separating domestic politics from foreign policy and but occasionally domestic politics can influence relationship with foreign parties.

Terjemahan:

Kedua negara adalah negara demokrasi jadi kita menganut sistem politik itu dan terkadang keputusan dari salah satu negara demokrasi menjadi masalah bagi negara yang lain dan itu merupakan dimana kedua negara perlu membuat keseimbangan dan sejauh ini saya pikir kedua negara melakukan tugasnya dengan baik dalam hal memisahkan politik domestic dari poliitk luar negeri namun terkadang politik domestik ini dapat mempengaruhi pihak-pihak luar negeri juga.

I: So far so good?

Terjemahan: Jadi sejauh ini baik –baik saja, ya?

A: yes

Terjemahan: Ya.

I: So what kind of bilateral relationship do these two countries have?

Terjemahan: Jadi jenis hubungan bilateral apakah yang dimiliki oleh kedua negara?

A: A strong one. Hehehe.

Terjemahan. Suatu jenis hubungan yang kuat.

I: hmm?

A: A strong relationship and a relationship that I think hmm

Terjemahan: suatu hubungan yang kuat dan ini merupakan suatu hubungan yang

I: very strong?

Terjemahan: maksud anda sangat kuat?

A: well it has a lot of depth to the relationship.

Terjemahan: ya kuat. Sebuah hubungan yang kuat. Sebuah hubungan yang memiliki.

I: a lot of ?

Terjemahan: banyak?

A : Depth

Terjemahan: Kedalaman

I: oohh

A: depth, *itu apa namanya ? hubungan dalam* so there are many aspects to the relationship as an example if you take Australia's relationship with China, it is very much focus on economic it is very much an Economic relationship but in a case of Australia's relationship with Indonesia it is much broader with a focus on military cooperation,

defense cooperation, development to navy system this obviously still a business and economic component to the cooperation but there is political support for one another as well and I think Australia and Indonesia both leaders in local region supporting peace and a rules fast order in the Southeast Asian region through vehicles like the East Asia summit,

Terjemahan: kedalaman. Jadi ada banyak aspek dalam hubungan itu misalnya saja mari kita lihat hubungan Australia dengan China, hubungan mereka ini lebih banyak berfokus pada sector Ekonomi jadi hubungan Ekonomi saja tapi dalam kasus dengan Indonesia, hubungan Australia dan Indonesia lebih luas lagi dengan berfokus pada kerjasama militer, kerjasama di bidang pertahanan, pengembangan system kelautan yang tentu saja ini masih berkaitan dengan bisnis dan komponen kerjasama Ekonomi tapi ada dukungan politik satu sama lain dan juga saya ras Australia dan Indonesia pemimpinnya dalam wilayah local mendukung adanya perdamaian dan keteraturan di Wilayah Asia misalnya dengan adanya suatu wadah seperti pertemuan Negara-negara Asia Timur.

I: eh, hmmm? Excuse me?

Terjemahan: hmm maaf, maksud anda tadi?

A: and through international forum like the East Asia summit and Australia's engagement with ASEAN as well.

Terjemahan: melalui pertemuan di forum internasional seperti pertemuan negara-negara Asia Timur dan juga adanya keterikatan antara Australia dan negara-negara anggota ASEAN.

I : hmm so we have relationship in Defence or in Military, Economics, what else?

Terjemahan: jadi hubungan kedua negara adalah di bidang pertahanan atau militer, Ekonomi, dan apalagi?

I: Social and Culture.

Terjemahan: social dan budaya juga?

A: Social and cultural,

Terjemahan: social dan budaya juga

I: Education

Terjemahan: pendidikan

A: Education. Education is the big one, we almost forgot that so Australia is a number one destination for Indonesian students studying abroad and yeah that's a big focus for the Australian Government that cooperation that comes through education. So there is an economic benefit to Australia through that relationship. I think Education is the third largest sector in Australia but at the same time is also a hmmm there are cultural exchange benefits through education because it makes ,hmm it encourages interaction between Australia and Indonesia and I think it equivalent example going on the other direction is tourism to Indonesia so hmm over a million of Australians travel to Bali every year.

Terjemahan: ya pendidikan. Pendidikan adalah sektor yang sangat berperan, kita hampir saja melupakannya. Jadi Australia adalah negara nomor satu yang menjadi

tujuan para pelajar Indonesia untuk belajar/bersekolah di luar negeri dan ya ini tentu saja menjadi focus besar bagi pemerintah Australia mengenai kerjasama yang berasal dari sector pendidikan. Jadi ada keuntungan ekonomi bagi Australia melalui hubungan ini. Saya pikir pendidikan adalah sector ketiga terbesar bagi Australia dan dalam waktu bersamaan dan dari sector ini juga dapat memberikan keuntungan dalam pertukaran budaya antar kedua negara, hmmm ini mendorong adanya interaksi antara Australia dan Indonesia dan saya pikir sebagai timbale baliknya contohnya dapat disaksikan dalam pariwisata di Indonesia, jutaan orang Australia berkunjung ke Bali setiap tahunnya.

I : why do you guys always go to Bali? Why don't you try other parts of Indonesia? why Bali

Terjemahan: tapi mengapa kalian hanya sering mengunjungi Bali? Mengapa tidak mencoba tempat-tempat lain di Indonesia? Mengapa selalu saja Bali?

A: well Increasingly, they are travelling to other parts of Indonesia but that's on the statistics on matter more difficult to obtain because the main port of entry to Indonesia is by the airport in Bali and then they move to other destinations after they enter through Bali.

Terjemahan: ada peningkatan, mereka juga mengunjungi bagian-bagian lain di Indonesia di statistiknya dan ini juga sulit ditemukan karena Bandar udara utama dari Australia ke Indonesia adalah Bandar Udara di Bali jadi mereka mengunjungi tempat-tempat lain setelah mereka dari Bali.

I: *smiling. yeah many people go to Bali. We have other parts of places that are also very enjoyable other than Bali.

*Terjemahan: *senyum. Ya begitu banyak wisatawan pergi ke Bali. Padahal kami memiliki tempat-tempat lain yang juga menyenangkan untuk dilihat selain Bali.*

A: yeah, I think it is.

Terjemahan: ya, tentu saja.

I: like Lombok.

Terjemahan: misalnya, Lombok.

A: Lombok, Labuan Bajo are becoming popular. Lots of students go to Java every year. Yeah, so I think hmm it is expanding.

Terjemahan: Lombok, Labuan bajo menjadi populer sekarang. Juga banyak yang pergi belajar ke Jawa. Ya jadi saya rasa, ada mengalami perluasan.

I: Specifically in Makassar, hmm what kind of relationship?

Terjemahan: secara spesifik di Makassar, apa saja hubungan yang terjalin?

A: hmmm yeah, like earlier I spoke about the traders between Makassar and the indigenous Australian. So the city really or South Sulawesi is the birth place of Australian Indonesian relation so that is something we are trying to high light quite often with our public diplomacy program in this office we would in each year annually we will celebrate NAIDOC week which is indigenous.

Terjemahan: jadi hmmm ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi tentang hubungan antara pedagang Makassar dan penduduk asli Australia. Jadi kota ini benar – benar menjadi atau Sul-Sel adalah tempat lahir hubungan antara kedua negara jadi itulah yang sering kami tandai dalam program hubungan diplomasi publik kami di kantor ini. Dalam setiap tahunnya kami mengadakan perayaan pekan NAIDOC dimana penduduk asli,

I: na?

A: it is called NAIDOC week, N-A-I-D-O-C

Terjemahan: ini disebut pekan NAIDOC, N-A-I-D-O-C

I: it is a, what language?

Terjemahan: ini adalah apa? Sebuah bahasa?

A: it is an ACRONYM

Terjemahan: ini adalah sebuah singkatan

I: oh Okay

Terjemahan: oh baiklah.

A: *singkatan* for Australian Aboriginal to celebrate Indigenous Australia culture

Terjemahan: singkatan untuk Aborigin Australia untuk merayakan kebudayaan penduduk asli Australia

I: the Aboriginal?

Terjemahan: penduduk Aborigin?

A: yes correct. So that's a historic connection with this city that we regularly highlight but beyond that there are Alumni community here in Makassar. We have Alumni association called IKAMA and which is chaired by committee of influential Australian Alumnae based in Makassar. Annually we hold a Alumnae gala dinner in Makassar and it is also an Education connection between Australia and the two cities so I know Queensland , and UIL, Union institute of language has a cooperation with Bosowa on English language Education, Hasanuddin University has a this is a member University and a host University of Indonesia and Australia center which is a research partnership between Australia and Indonesia hmmm as well as a host of other research cooperation that take place between Indonesian and Australian universities. At the city level, recently we have the Mayor of the Gold coast visiting Makassar.

Terjemahan: ya betul. Jadi itulah hubungan historis dengan kota ini yang selalu kami tandai namun lebih dari itu juga ada komunitas Alumni di sini di Makassar. Kami memiliki perkumpulan Alumni yang disebut IKAMA dan itu diketuai oleh komite berpengaruh alumni Australia yang berbasis di Makassar. Setiap tahun kami mengadakan jamuan makan malam di Makassar dan juga adanya koneksi antara Australia dan dua kota ini yang disebut Queensland dan juga UIL (institute Uni Bahasa) yang bekerjasama dengan Universitas Bosowa dalam bidang pendidikan Bahasa Inggris dan juga kerjasama dengan UNHAS yang merupakan kerjasama di bidang penelitian antara Australia dan Indonesia hmmm dan juga sebagai tuan rumah dari kerjasama dalam bidang penelitian lain yang melibatkan Universitas-Universitas di

Indonesia dan Australia. Dalam tatara kota, baru-baru ini kita mendapat kunjungan dari walikota Gold Coast berkunjung ke Makassar.

I: Gold coast?

Terjemahan: Gold Coast?

A: Gold coast itu kota dekat Brisbane di Australia

I: ahhhh yeah. I see

Terjemahan: ya saya paham.

A: Tourism city and he signed the letter of the intent for exploring a future sisters city relationship between Makassar and the Gold Coast in Australia yeah so the host of business and community and education connection between Australia and Makassar. another example is the eastern pearl flour mills hmmm so

Terjemahan: kota wisata. Walikota menandatangani surat untuk mengeksplor hubungan Sister city antara kedua kota, Makassar dan Gold Coast di Australia yeah menjadi tuan rumah hubungan bisnis dan komunitas juga pendidikan antara Australia dan Makassar. Kerjasama lain misalnya adanya pabrik terigu kawasan timur Indonesia. Hmmm jadi,

I: hmmm what? Mil?

Terjemahan: maaf apa? Mil?

A: eastern pearl mills apa namanya, pabrik . pabrik apa namanya *laughing

I: *laughing I don't know

*Terjemahan: *tertawa. saya tidak tahu, tidak jelas.*

A: Untuk mie goreng, ya?

I: heh?

A: Mie goreng

I: noodle?

Terjemahan: mie?

A: apa di, mie

I: mie, noodle

A: Terbuat dari apa? dibikin dari hmmm

I: Terigu?

A: I just ask (leaving his seat and ask the staff)

Ya, terigu. Pabrik terigu.

A: 50 % of eastern pearl flour mill is owned by the Australian grand cooperative CPH group so it is the eample of Australian investment in Makassar

Terjemahan: 50 % pabrik terigu kawasan timur dimiliki oleh CPH grup yang ini merupakan contoh investasi orang Australia di Makassar.

I: so Basically there are three major sectors that consulate general is working for: Education, trading and social and cultural?

Terjemahan: jadi pada dasarnya ada tiga kerjasama utama yang Konjen kerjakan disini yaitu: Pendidikan, Perdagangan, dan Sosial kebudayaan?

A: true

Terjemahan: ya anda benar.

I: Three?

Terjemahan: ada tiga kan?

A: true. to a lesser extent hmmm political relationship so government to government relationship.

I: here?

A: yes, so We maintain relationship with the mayor office, the governor office and the range of other local government and stakeholders around eastern Indonesia because this office represents Australia in Eleven provinces of eastern Indonesia.

I: eleven?

A: eleven. yes

I: all is here?

A: jadi, Papua, Maluku

I: what do you have?

A: Papua, Maluku, Sulawesi dan NTT

I: NTB not?

A: *Bukan. Ya itu hmm Konjen Bali*

I: ooh Okay

A: ya mewakili di NTB

I: Sulawesi, all provinces?

A: all provinces, yes. Yeah same with Papua. Papua dan Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

I: eleven?

A: eleven, true. So hmmm yeahh *apa, hmmm saya menjelaskan apa?*

I: hmm yes talk more about

A: yah political relationship, government to government relationship and also engagement or others are hmmm *mendukung program bantuan*, development programs. Yeah support for Australian development programs.

I: I want you to talk more about these three sectors. It is Australia doing, the education, social cultural and trading.

A: yeah, yes so For education hmm I would say that's good if we could separate it into 3 sectors again Promoting Australia as a study destination

I: number one I think in Indonesia right?

A: number one , yes. Hmmm Second point is hmm engaging with Indonesias Alumni community, Australian alumni and number three supporting Australian students to study in eastern Indonesia an eample that is the new Colombo Plan

I : oh okay.

A: so yeah that would be the three main areas for education for cultural diplomacy.

I: and what does the consulate General do for this? Giving scholarship or what?

A: hmm No. the Australian embassy manages the scholarship to study in Australia under the Australia award but we help promote the Australia award programs with the Local stakeholders, and through social media, online media

I: hmm so that's AAS yes or ADS in the past?

A: yes Australia Award Indonesia

I: and in social cultural sectors?

A: in social Cultural so our main focus is indigenous cultural promotion. Promoting Australia's Indigenous culture hmmm so here we hold an event NAIDOC of Weeks which I eplain earlier

I: it is once in a month? Once in a year?

A: Once per year yes, yeah and so hmmm yes that is something we highlight every year at NAIDOC week. on social cultural as well we also support Makassar writers festival

I: Makassar?

A: Makassar International writers festival

I: oh MIWF I was there. Back in 2015 and 2016

A: yeah right. So the founder of the Festival Ibu Lilik also has close Connection with Australia so which is the fantastic for us and hmmm

I: Are you friends with her daughters?

A: with who?

I: hmm her daughters, Hmm I am sorry. Mistake, skip.

A: son?

I: hmm I thought it is the same person

A: Ibu lilik?

I: not Ibu Lilik, there are two Australian ladies they can dance and now they live in Australia

A: hmmm No. I am not familiar. What else on mmmm cultural? hmmm

I : I also see that you spreading the news through social medias, right?

A: yes, yes that's another part of use of social media engagement and traditional media engagement so we run media relations for events hmm that we hold around the year and we invite media along to our events.

I: and How do you see the difference? Does it work good?

A: hmm the main difference Traditional media we have less control over the messaging where social media is more of conversation is two directional and we can we are more controlling our message whereas traditional media

I: and also I thought the target is different, right?

A: yeah hmm true

I: maybe the social media the target is more to the youth

A: I would agree with that. Yeah, yeah that's true

I: and I think, you know it is better the impact is quite significant.

A: yeah I think is easy to grab the community with social media, the traditional media is more I suppose more passive

I: young generation does not read newspaper any more

A: yeah true. Many others things is film. So we are holding a film festival in two weeks time

I: in two weeks time? Really?

A: 23, 24 Maret

I: 324, what do you mean?

A: Friday, Saturday, Sunday

I: where?

A: at CGV Cinema, Indayu

I: CGV? Indayu? what's that? A TV channel?

A: CGV it is a Cinema comple

I: oh okay, it is in two weeks?

A: yes. 23 -24 March.

I: only in march?

A: once per year. Annual.

I: I see

I: how about the trading?

A: and for trade, the relationship for trade between Australia and Eastern Indonesia is to developing hmmm so one of the reasons Australia open the office in Makassar is to increase trade linkages between eastern Indonesia and Australia but at the moment as I explained before there is eastern pearl flour mill

I: Which one do you mean? Is it in Makassar?

A: *dekat pelabuhan, gedung besar yang warna kuning ketika lewat*

I: is it nearby fort Rotterdam?

A: *hmm lebih dekat pelabuhan Tua. Apa namanya itu?*

I: old harbor

A: yah, old harbor. Hmm so at the moment a lot of Australian business is being focused on mining and mineral industries. Hmmm particularly service industries

I: like in Vale?

A: in eample is in Luwu there is a gold mine. I think it is a gold and nickel mine in Luwu run buy Nusantara resources and I am not sure the eact location but hmm Nusantara resources

I: is it in Sorowako? Different?

A: hmm it could be yeah. I have never been there personally

I: seriously? I saw Mr. Richard visited Luwu quite sometimes

A: he did yeah, yeah that name is familiar so perhaps it is Sorowako. So yeah hmm in terms of hmm the investment industries we are encouraging Australian to invest in mills overseas advance focus on renewable energy

I: renewable energy?

A: yeah. *(energy terbarukan) dan juga hmmm pariwisata sectors, Sektor pariwisata* so these are the industries that we see is offering potential to Australian companies because they are likely to see significant growth over the net ten fifteen twenty years hmm but also Australia has competitive advantage and these industries are not only important for economic opportunity for Australian companies but also strategically important for economic development in human development in eastern Indonesia.

I: is it potential? is Makassar potential? Hmm I meant is eastern part of Indonesia potential? Beneficial?

A: beneficial for?

I: for trading

A: For trading? yeah I think the interest in Makassar is as a hub city, as a center for interaction. So in example of tourism, I don't see Makassar necessarily as a tourism center compare to developing places like Labuan Bajo or hmm Toraja but hmm the city is a service centre for Eastern Indonesia so hmmm It does make sense to for Australia to have a presence in Makassar because those who travel to eastern provinces of Indonesia usually transfer by Makassar, yeah and on the trade relationship so just last week Australian and Indonesian trade ministers signed in a new free trade agreement, the first in the history between Australia and Indonesia so that is a good thing for the economic relationship.

I : good. It is very good. Hmmm okay I think we move to the net question. Maybe it is gonna be more political, because you know it is about the Espionage.

A: uuhhh. *laughing the?

I. you know the Espionage. Do you still remember that?

A: oh yeah. Yes I remember that

I: How do you see that? And how does it affect the bilateral relationship? It happened in 2009.

A: yeah I don't want to talk on that.

I: *laughing

A: yeah, It is not something hmm I am not aware of the details of it so

I: hmm you mention a little bit about you know political, a little bit about political even though it is more to you know local government.

A: hmmm

I: Does it really not giving an effect into the bilateral relationship? The Espionage in 2009

A: yeah I mean at that time it was a political issue between countries and that was , there was a lot of coverage in media about the allegation of spying so whenever an issue get to media coverage hmmm and it has a potential impact to bilateral relationship but Hmm I will call them ups and downs. The downs has been followed by ups.

I: *laughing. So it is natural again. Come on talk more about that, no?

A: *laughing hmm what, the, for?

I: I mean, I mean the impact to these two countries?

A: yeah I see we still have the strong relationship and say the relationship with Australia and Indonesia at the moment is quite strong hmm so.

I: when it happened, was there any different? Like maybe the decrease of the number of the students going to Australia or ?

A: I don't have data on that. yeah I am not sure the statistics on issues like that impact things. hmhhh

I: hmhhh *smiling well Okay.

A: *smiling

I: so what's your hope or epecatation and you know focus about this bilateral relationship?

A : hmhhh

I: I hope there is no more Eespionage in the future so we are going stronger and there is no more you know *curiga*

A: hmhhh so what was the question? My hope for the bilateral relationship into the future?

I: yeah, yeah.

A: yeah. I think going forward hmm Indonesia is increasing in like the economic value of Indonesia is increasing hmm and so I think not only, not only the what is the term? the aggregate size of the Indonesian economy but also the individual and the development of hmhhh human development of people in Indonesia so GDP per capita as well as aggregate GDP. So I think as the relationship advances through time aid and development would become a decreasing focus of the relationship with a maybe

increase focus on hmmm defense cooperation and economic hmmm cooperation. So the free trade agreement I would think would provide a new level of, hmm a new mechanism for improving hmm to wider trade and investment between Australia and Indonesia. So I think that would be a cape component of the future political relation. Eh future bilateral relationship. Hmm Political relationship, it is very much more difficult to focus but hmm I think that yeah the longer the relationship is going on the closer the relationship has been, so

I: I think the consulate general is trying to do the grass root you know diplomacy like it is more to human and human contact like, you touch the grass root, you touch the students, you touch people in the University I mean but of course if there is a political issue happened it will give an impact right?

A: hmmm

I: will it impact the education, social and cultural and the trading sectors?

A: I mean I don't have statistics on this. I remember there is for memory hmm and Irma want to check this statistics but hmm I think I make a recall at that time of the ecetuion and the disagreement between Australia and Indonesia at the time of the Bali 9 ecetuion. there was talk that might influence Australian tourism hmm arrival to Indonesia but as our recall this could be wrong the impact of that diplomatic dispute did not really impact hmm tourism arrival between Australia and Indonesia so there would be score to do more research on the impact of political and bilateral dispute on things like the economic and cultural relationship but my suspicion is that everyday Australian and

Indonesians don't care too much about the high level and the interaction of the government yeah

I: the byrocracy

I: well I think It is good just keep doing what you are doing now like sometimes maybe it is gonna be balance I mean even though there is something happened in the high level officials but in the grass root it is okay

A: I think it is important that our relationship with one another not determined by political forces that at the end of the day outside of our everyday control

I: *smile hmmm okay let's imagine if one day our relationship is broken or tends to be broken hmm what will you, what steps will you take to prevent for eample if espionage happened or other bad things happened in the future what steps will you take ? To maintain or to strengthen

A: *laughing I can't comment on the specific of that. Can you ask the question again?

I: the question number 9. Last question, can you read it? If you read it maybe you will have better understanding on the question. Question number 9

A: number 9

I: yeah. If something happened in the future. How to avoid something bad happen in the future? What steps will you take? Question number 9.

A: hmm yeah I mean question number 9 that you have written here does not include espionage. I mean the issue is as by the Australian government doesn't speak on the intelligence operation and I am pretty sure the Indonesia government has a similar rule

I: *laughing

A: hmm but in terms of ups and downs in the political relationship, I think you know the diplomatic community has the large role to play providing advice to the government about the impacts and all potentials impacts of the Australian government decision so hmm for the Australian government diplomatic foot print uuh, just give me a second.

Pause the Phone is ringing

Continue

A: Thank. so yeah I think for other comings ups and downs in the relationship the diplomatic community has the important role so in the case of the Australian embassy in Jakarta as the largest embassy in terms of hmm the size as the largest Australian Government international mission overseas so put in other way we have more diplomatic resources in Indonesia than any other countries so I think that in itself highlight the important of the Australian government praises maintaining the positive relationship with Indonesia and hopefully those resources can provide advices to Australian Government on making decision that place that relationship in a healthy position.

I: hmmm

A: hmmm

I: hmm hopefully *smiling

Okay, I think that's all. Thank you very much

A: okay thank you

I: Do you have question?

A: no question from me , No question from me. hmm may perhaps you still want

Or do you have more specific ideas. Is it for assignment or a hmmm?

I: it is for my Final assignment.

A: hmm final assignment

I: I have been waiting for a year to talk to one of the staff

A: yeah, it is hard to get to find time for things like that we have just finished our main tourism event last week so we have a brief break on our calendar to catch up which is good. Hmm So best of luck with your assignment.

I: yeah, hopefully. Thank you very much

A: yeah thank you.